

**KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB
NOMOR 2383 07 NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG
PEMBAJAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Gumilar Bagus Pambudi

NIM. 135010100111007



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRABWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul KEKUTAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 7 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBAJAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dan sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan sebagai masukan bagi penulis.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, dorongan, serta masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu saya .
2. Dr Hanif Nur Widhianti , S.H., M.Hum ., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Nurdin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;

4. Agis Ardiansyah, S.H., L.L.M., selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Untuk saudara Partai Mahasiswa Pinggiran 2013.
7. Keluarga Besar Partai Mahasiswa Pinggiran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT sebagai pembimbing hidup yang memberikan kepastian bagi umatNya untuk menempuh jalan sesuai pilihan hidupnya selalu menjadi pengingat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang 26 Maret 2018

Penulis



LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07
NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG PEMBAJAKAN DAN ARMED ROBBERY DI
SOMALIA**

Oleh:

**GUMILAR BAGUS PAMBUDI
135010100111007**

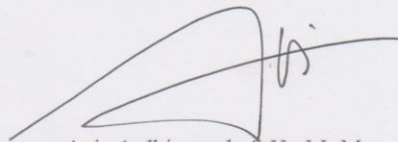
Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 30 MEI 2018

Pembimbing Utama



Nurdin . S.H., M.Hum.
NIP. 195612071986011001

Pembimbing Pendamping



Agis Ardiansyah, S.H., LL.M.
NIP. 198403132009121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197808112002122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN
KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07 NOVEMBER
TAHUN 2017 TENTANG SITUASI DI SOMALIA

Identitas Penulis

a. Nama : GUMILAR BAGUS PAMBUDI
b. NIM : 135010100111007

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal: 14 Maret 2018

Pembimbing Utama



Nurdin, S.H., M.Hum.

NIP. 195612071986011001

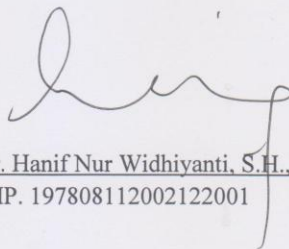
Pembimbing Pendamping



Agis Ardiansyah, S.H., LL.M.

NIP.198403132009121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 197808112002122001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1814 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Nurdin, SH.M.Hum.; Agis Ardiansyah, SH.LLM.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Gumilar Bagus P NIM 135010100111007**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Desember 2017



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 253/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : GUMILAR BAGUS PAMBUDI
NIM : 135010100111007
Judul : IMPLIKSI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383
07 NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG SITUASI DI SOMALIA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

RINGKASAN

Laut merupakan salah satu sarana transportasi yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Dalam perkembangannya timbul berbagai permasalahan yang muncul di laut, salah satunya ialah pembajakan kapal. Peristiwa pembajakan yang menarik perhatian dunia internasional adalah pembajakan kapal yang terjadi di wilayah perairan Somalia. Setiap tahunnya kasus pembajakan ini terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam dunia pelayaran. Peristiwa pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi di laut teritorial Somalia, akan tetapi sebagian peristiwa pembajakan yang terjadi pada awalnya terjadi di laut lepas kemudian dibawa kedalam laut teritorial negara Somalia.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kekuatan hukum resolusi dewan keamanan PBB nomor 2383 tentang pembajakan dan armed robbery di Somalia dan peristiwa pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia, kedua untuk mengetahui pengaturan pembajakan kapal di dalam UNCLOS 1982. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung yang selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengaturan terhadap pembajakan kapal diatur di dalam UNCLOS 1982. Secara keseluruhan di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya yurisdiksi universal dari setiap negara untuk menindak pembajakan yang terjadi di laut lepas. Peristiwa pembajakan kapal yang timbul di Somalia terjadi di laut teritorial negara, hal ini membuat PBB sebagai organisasi internasional mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengatur secara luas yurisdiksi universal negara-negara dalam menindak para pembajak. Di keluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2383 oleh PBB.

SUMMARY

The sea is one means of transportation that plays an important role in international trade. In its development emerged various problems that arise in the sea, one of which is piracy ship. Piracy events that attract international attention is the piracy of ships that occurred in the territorial waters of Somalia. Every year this case of piracy continues to increase causing concern in the world of shipping. This hijacking of vessels not only occurs in the territorial sea of Somalia, but some piracy events that occurred initially occurred in the high seas then carried into the teritrorial sea of Somalia.

The purpose of this paper is to know the legal force of UN Security Council resolution 2383 on piracy and armed robbery in Somalia and ship hijacking events that occurred in the waters of Somalia, secondly to know the arrangement of piracy kapaldi in UNCLOS 1982, .The research method used by the author is juridical normative research is done by researching library materials or secondary data indirectly which further data is analyzed by using qualitative approach.

Arrangements on ship hijacking are set out in UNCLOS 1982. Overall in these passages explain the universal jurisdiction of each country to crack down on piracy on the high seas. Hijacking of vessels arising in Somalia takes place in the territorial sea of the country, making the United Nations an international organization to issue UN Security Council Resolutions to broadly regulate the universal jurisdiction of states in cracking down on pirates. at the release of United Nations Security Council Resolution 2383 by the United Nations.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iv
Abstraksi	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dewan Keamanan PBB	9
1. Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB	13
2. Mekanisme Pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB	20
3. Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB	24
B. Yuridiksi Negara dalam Hukum Internasional	33
1. Pengertian yuridiksi menurut Hukum Internasional	33
2. Tanggung jawab Negara	34
C. Pengertian Pembajakan dan Armed Robbery	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	44
F. Definisi Konseptual	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Setelah Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2383 Terhadap Somalia.....	46
1. Kekuatan Hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB.....	46
2. Ketentuan UNCLOS 1982 tentang Piracy dan Armed Robbery..	50
3. Resolusi yang berkaitan dengan pembajakan	53
4. Kewenangan angkatan laut gabungan untuk memberantas pembajakan di perairan Somalia.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-Negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹ Hukum internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat selama pasca perang dunia ke 2 dengan dibentuknya perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan Negara-negara, serta adanya gerakan yang disponsori oleh PBB yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia.²

Negara Somalia adalah Negara yang berbatasan dengan Ethiopia di sebelah barat, Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden di utara, dan Lautan India di Timur. Perairan yang menjadi batas Negara Somalia yaitu Teluk Aden dan Samudra Hindia merupakan pusat dari

¹J.G.Starke, *Pengantar Hukum internasional* 1, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta : Sinar Grafika 2008) hlm 3

²*Ibid*, hlm 4

pelayaran internasional. Sayangnya jalur perairan tersebut sudah tidak aman lagi karena adanya perompak Somalia.³

Perompak Somalia atau bajak laut Somalia merupakan sebutan bagi para bajak laut yang beroperasi di wilayah perairan Somalia yang meliputi kawasan Samudera Hindia hingga lepas pantai timur Somalia, Laut Arab dan Teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia.⁴ Perompak Somalia sering membajak kapal dan menyandera para awak maupun penumpang kapal di Samudra Hindia, kemudian membawa mereka ke pantai Somalia untuk meminta uang tebusan.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu *International Maritime Bureau* (IMB), *International Maritime Organisation* (IMO), dan *National Geospace Intelligence Agency* (NGA), terdapat 1190 insiden perompakan di daerah Somalia. Pada tahun 2005, terjadi 51 insiden perompakan. Di tahun 2006, terjadi 39 insiden perompakan. Pada tahun 2007 terjadi 63 insiden perompakan. Tahun 2008 ada 197 insiden perompakan di Somalia. Tahun 2009 ada 247 insiden perompakan di Somalia. Tahun 2010 terjadi 290 insiden perompakan. Angka itu meningkat pada tahun 2011, dilaporkan telah terjadi 303 insiden

³*Sejarah Negara Somalia*. <http://www.bimbie.com/sejarah-negara-somalia.htm>, diakses pada 08 November 2017

⁴Apriadi Tamburaka. 2011. *'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV. Sinar Kudus'*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). Hlm. 17

perompakan.⁵ Hampir seluruh kejadian perompakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat tidak ada tindakan yang dilakukan Negara Somalia dalam upaya memberantas perompakan yang terjadi di Negara Somalia. Perompakan yang terjadi di perairan Somalia bisa saja dihentikan apabila Presiden TFG Somalia, Abdullahi Yussuf Ahmed meminta bantuan pada PBB dengan memberikan izin kepada Negara mana pun untuk menumpas para perompak di wilayahnya.

Aktivitas perompak Somalia memang menjadi ancaman serius bagi dunia pelayaran internasional sejak abad 21. Perompakan yang telah berlangsung selama ini telah menjadi ancaman yang menakutkan bagi kapal-kapal dari berbagai negara di belahan dunia yang melintasi perairan Somalia, sehingga melambungkan nama perompak Somalia di mata internasional.⁶

Perompakan yang terjadi di Somalia jelas merupakan persoalan internasional. Berdasarkan Piagam PBB Bab 1 Pasal 1 (1), yang berbunyi:

⁵F. Ibanez. *Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian Ocean(2005-2011) Evolution and Modus Operandi*. Vol 1, Journal, 2013. Hlm. 5.

⁶Apriadi Tamburaka. 2011. *'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABKMV.Sinar Kudus'*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). Hlm. 17

Article 1

- 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*

Dinyatakan bahwa tugas pokok berdirinya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.⁷ Perompakan tergolong sebagai tindakan ilegal berupa kekerasan dan penjarahan terhadap kapal komersial. Kapal perompak juga menghalangi bantuan kemanusiaan yang masuk untuk mengatasi krisis pangan di Somalia. Oleh sebab itu, tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengancam keamanan internasional dan kepentingan kemanusiaan secara luas. Salah satu Hukum Internasional yang mengatur mengenai penanganan

⁷Piagam PBB yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berbunyi “memelihara perdamaian dan keamanan

Internasional dan untuk tujuan itu : melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

terhadap perompak Somalia adalah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982. Hukum tersebut memuat pasal yang berisi pengertian perompakan dan aturan penangkapan terhadap perompak. Secara substansi, ketentuan dalam hukum tersebut seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan perompak. Tetapi tindakan pelanggaran hukum tersebut masih terus menerus terjadi hingga kini. mengingat aturan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Negara Somalia. Masalah tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena seharusnya secara substansi, hukum dibuat untuk menindak tindakan pelanggaran hukum. Tetapi mengapa hukum justru lemah dalam menyelesaikan persoalan perompak. Secara teoritis, masalah tersebut dapat dianalisis melalui ketentuan yurisdiksi hukum yang dimuat di dalam aturan UNCLOS 1982 dan ILC *Draft Article* on responsibility internationally of wrong ful act 2001 untuk mengetahui mekanisme hukum yang digunakan untuk mengatasi kasus tersebut.

Pada 7 November, Dewan dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2383, yang memperbarui tindakan kontra-pembajakan di lepas pantai Somalia. Pada 14 November, Dewan mengadopsi resolusi 2385, pada sanksi Somalia dan Eritrea dengan 11 suara setuju dan empat abstain (Bolivia, China, Mesir dan Rusia). seperti yang diminta oleh resolusi 2316 (2016), tentang pelaksanaan resolusi itu dan pada situasi sehubungan dengan pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia, Menegaskan kembali penghormatannya terhadap

kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan politik, dan persatuan Somalia, termasuk hak kedaulatan Somalia sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan sumber daya alam lepas pantai, termasuk perikanan, Memperhatikan bahwa upaya bersama kontra-pembajakan dari Negara, wilayah, organisasi, industri maritim, sektor swasta, think tank, dan masyarakat sipil telah menghasilkan penurunan terus-menerus dalam serangan bajak laut serta pembajakan sejak 2011, dan mengungkapkan kekhawatiran tentang insiden pembajakan baru-baru ini yang terjadi selama tahun 2017 dan oleh ancaman yang sedang berlangsung yang menghidupkan kembali perompakan dan perampokan bersenjata di laut menimbulkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat, aman, dan efektif ke Somalia dan kawasan, untuk keselamatan pelaut dan orang lain, untuk navigasi internasional dan keselamatan rute maritim komersial, dan kapal-kapal lain, termasuk kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi sesuai dengan hukum internasional, memuji kekuatan angkatan laut China dan India untuk menggagalkan serangan terhadap OS-35, tentara operasi Tiongkok untuk menangkap tiga perompak, dan Pasukan Angkatan Laut Cina dan Uni Eropa (EU NAVFOR) untuk mencegah serangan terhadap MV Al Heera, dan negara-negara yang lebih maju yang telah mengerahkan pasukan laut di Teluk Aden dan Cekungan Somalia membujuk jaringan pembajakan agar tidak melakukan tindakan pembajakan, Mendukung hasil Konferensi London Somalia yang diadakan pada 11 Mei 2017, dan komitmen Pemerintah Federal dan Negara Anggota Federal Somalia untuk

mengembangkan kemampuan keamanan maritim mereka, Oleh Karena itu penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul **“KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07 NOVEMBER 2017 TENTANG PEMBAJAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA”**

B. Rumusan Masalah

Skripsi ini mengangkat dua (2) pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2383 terhadap Somalia ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pasca disahkannya resolusi PBB Nomer 2383 tahun 2017 terhadap Somalia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan substansi ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum internasional. Dengan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemikiran- pemikiran baru bagi akademis dan para pembaca pada umumnya terkait dengan resolusi yang dijatuhkan oleh dewan keamanan pada suatu Negara.

2. Manfaat Praktis

- i. Bagi praktisi maupun dosen Hukum Internasional dan mahasiswa.

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum internasional baik para pengajar atau dosen maupun mahasiswa yang menempuh konsentrasi di bidang hukum internasional sehingga dapat menjadi informasi dan refrensi untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak resolusi yang diberikan oleh dewan keaman PBB pada suatu Negara .

- ii. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini sebagai salah satu sumber untuk informasi pemikiran dan dapat dijadikan salah satu referensi terkait masalah hukum ini .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Keamanan PBB

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, untuk menekan kelaparan, penyakit dan buta huruf, mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan masing-masing individu serta menjadi pusat harmonisasi tindakan setiap negara untuk mencapai tujuan¹ tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB memiliki 5 organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah internasional, Dewan Keamanan dan Sekretariat.² Dari kelima organ yang memiliki kekuatan paling besar dan kuat.

Proposal *Dumbarton Oak*.³ Menekankan pentingnya sebuah badan eksekutif dengan menetapkan jumlah anggotanya dan

¹Anonim. *UN at a Glance* dalam <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> diakses tanggal 1 Oktober 2017.

²Anonim. *Main Bodies* dalam <http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml> diakses tanggal 1 Oktober 2017.

³Pertemuan yang diadakan oleh wakil-wakil dari Cina, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris di Dumbarton Oaks, yaitu sebuah rumah yang berada di Georgetown, Washington DC untuk merumuskan sebuah proposal pembentukan organisasi dunia yang kemudian menjadi dasar bagi PBB dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/173472/Dumbarton-Oaks-Conference> diakses tanggal 1 Oktober 2017.

mengemban “*primary responsibility for the maintenance of international peace and security*” atau tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁴ PBB menginginkan adanya organ eksekutif yang akan berfungsi secara berkelanjutan dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan efektif serta dapat melaksanakan dan memberlakukan Bab VII Piagam PBB bilamana perdamaian dan keamanan internasional terancam. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Keamanan (DK) dengan fokus utama pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan mengenai DK PBB ditetapkan dalam Bab V Piagam PBB yang terdiri dari susunan (Piagam PBB Pasal 23). Fungsi dan kekuasaan (Piagam PBB Pasal 24 – 26), pengambilan suara (Piagam PBB Pasal 27) dan tata tertib (Piagam PBB Pasal 28 – 32).

Sesuai dengan amandemen Piagam PBB tahun 1965, anggota DK awalnya berjumlah sebelas Negara dan meningkat menjadi lima belas.⁵ Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis dan Rusia yang disebut dengan *Big Five* atau *Five Great Powers* merupakan anggota tetap DK sementara sepuluh anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan sumbangsihnya terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta memperhatikan pembagian geografis

⁴Philippe Sands dan Pierre Klein. 2001. *Bowett's Law of international institutions*. London: Sweet and Maxwell. Hal 40.

⁵Piagam PBB Pasal 23, Resolusi Majelis Umum No. 1991-XVIII 17 Desember 1963 yang mulai berlaku pada bulan Agustus 1965 setelah diratifikasi oleh dua pertiga negara anggota.

yang adil. Anggota tidak tetap DK menjabat selama dua tahun, setiap anggota diwakili oleh satu perwakilan..

Negara yang mempunyai status sebagai negara anggota tetap DK PBB memiliki beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang menyandang status sebagai negara anggota tidak tetap. Kelima negara tersebut memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan status permanen sebagai anggota DK PBB akan tetapi juga atas alasan-alasan hak suara khusus terutama hak veto.⁶ Alasan bagi pemberian status luar biasa untuk kelima Negara ini terletak dalam “*inescapable fact of power differential*” dengan kata lain dasar pemikiran yang melandasi adalah kelima negara inilah yang memiliki tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sehingga mereka harus mempunyai hak suara final dan menentukan serta memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan.⁷

Selain anggota tetap, DK juga memiliki anggota tidak tetap yang dikelompokkan berdasarkan berbagai wilayah di dunia. Pengelompokan tersebut terbagi dalam: 1. Grup Eropa Barat dan lainnya (2 anggota), 2. Grup Eropa Timur (1 anggota), 3. Amerika

⁶Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara besar anggota tetap DK PBB yang biasa disebut dengan *Big Five*. Kelima negara tersebut adalah AS, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia. Walaupun istilah veto tidak terdapat dalam Piagam PBB, tetapi kelima negara anggota tetap DK tersebut dapat menolak suatu keputusan yang telah disepakati oleh anggota DK PBB yang lain sehingga keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Soeprapto. 1995. Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Hal. 387.

⁷Anonim. Tinjauan Umum Tentang Resolusi PBB dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35625/3/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 2 Oktober 2017

Latin dan Grup Karibia (2 anggota), 4. Grup Asia (2 anggota) dan 5. Grup Afrika (3 anggota). Anggota tidak tetap DK PBB untuk masa jabatan 2017 – 2018 adalah :

1. Bolivia (2018)
2. Mesir (2017)
3. Ethiopia (2018)
4. Italy (2017)
5. Jepang (2017)
6. Kazakhstan (2018)
7. Senegal (2017)
8. Sweden (2018)
9. Ukraine (2017)
10. Uruguay (2017)

Ketika tanggal telah menunjukkan akhir dari masa keanggotaan sebagai anggota tidak tetap DK, maka negara-negara diatas akan digantikan oleh negara lain dari kelompok regional yang bersangkutan. DK juga mengalami masalah selama beberapa dekade mengenai komposisi dari anggota tetap dan hak veto. Brazil, Jerman, Jepang dan India yang tergabung dalam G4 berusaha mencari inklusi sebagai anggota tetap DK dan merekomendasikan penambahan jumlah anggota DK menjadi 25 anggota. Namun setiap usulan untuk mengubah

organisasi dari DK harus membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota dari Majelis Umum PBB.⁸

Sejak DK mengadakan sidang pertama pada 17 Januari 1946 di Church House, London, DK telah mengambil tempat tinggal permanen di Markas Besar PBB di New York City. Setiap wakil dari masing-masing anggota harus hadir setiap saat di Markas Besar PBB agar DK dapat menghasilkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul.⁹ Setiap anggota dari dewan keamanan memiliki satu suara dan dalam proses pemeriksaan sengketa atau penerapan sanksi, membutuhkan sembilan suara setuju termasuk dari kelima anggota tetap DK yang memegang hak veto. Namun dalam prakteknya setiap anggota tetap bisa mengundurkan diri dalam proses pengambilan keputusan dengan tidak merusak vasiliditas atas keputusan yang telah dicapai.¹⁰

1. Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB

Secara umum fungsi dan wewenang Dewan Keamanan adalah (Piagam PBB Pasal 24) :

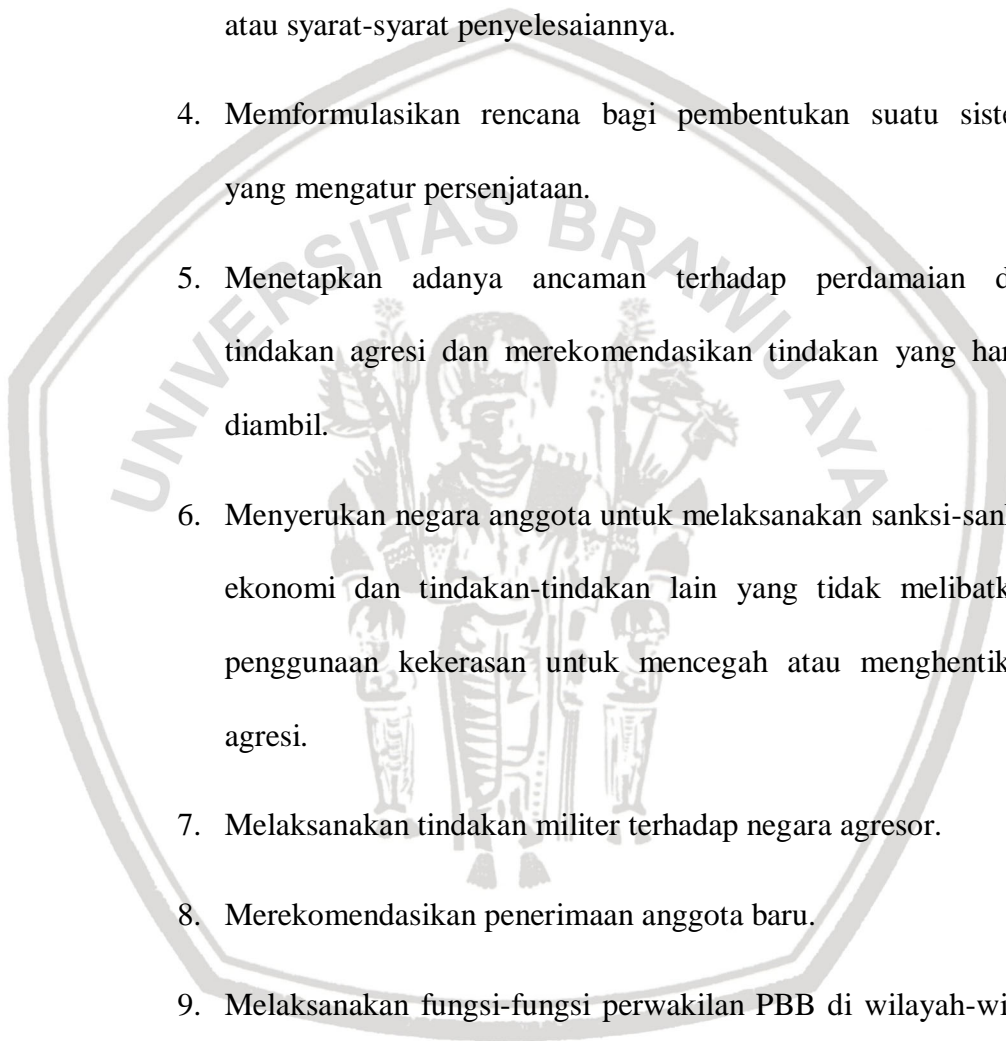
⁸Matt Rosenberg. *United Nations Security Council : The Security Council is the Most Powerful body in the United Nations* dalam

<http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/securitycouncil.htm> diakses tanggal 2 Oktober 2017

⁹Anonim. *What is the Security Council ?* dalam <http://www.un.org/sc/about/shmtl> diakses tanggal 2 oktober 2017

¹⁰Anomin . 28 Mei 2013. *United Nations Security Council* dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532070/United-Nations-Security-Council> diakses tanggal 2 Oktober 2017

1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB.
2. Menginvestigasi setiap pertikaian dan situasi yang mungkin menimbulkan dan menyebabkan friksi internasional.
3. Merekomendasikan metode-metode penyelesaian pertikaian atau syarat-syarat penyelesaiannya.
4. Memformulasikan rencana bagi pembentukan suatu sistem yang mengatur persenjataan.
5. Menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil.
6. Menyerukan negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan-tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Melaksanakan tindakan militer terhadap negara agresor.
8. Merekomendasikan penerimaan anggota baru.
9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di wilayah-wilayah strategis.
10. Menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jendral, bersama-sama dengan Majelis



Umum memilih Hakim-Hakim Mahkamah Peradilan Internasional.

11. Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum

Ketentuan mengenai pengambilan suara di tubuh DK diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB sedangkan tata tertib DK berisi ketentuan yang mendukung fungsi DK secara berkelanjutan antara lain kewajiban anggota untuk hadir dalam pertemuan (Piagam PBB Pasal 28), kewenangan untuk membentuk organ tambahan guna mendukung kinerja (Piagam PBB Pasal 29), kewenangan menetapkan prosedur termasuk dalam memilih Presiden DK (Piagam PBB Pasal 30), keikutsertaan negara anggota PBB yang bukan anggota DK dalam mengikuti pembahasan didalam DK tanpa hak suara (Piagam PBB Pasal 31), keikutsertaan negara anggota PBB yang bukan anggota DK atau negara yang bukan anggota PBB yang sedang bertikai dan mengajukan pertikaianya kepada DK (Piagam PBB Pasal 32).

DK sebagai organ politik menjalankan tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sejalan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung di dalam Piagam PBB. DK memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur di dalam Bab I dan berwenang mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu bilamana timbul suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi yang telah ditetapkan di dalam Bab VII. DK juga menetapkan pengaturan

regional dan inisiatif pemeliharaan perdamaian dan kemanan internasional sebagaimana diatur di Bab VIII (Piagam PBB Pasal 24 ayat 2).

Wewenang DK dalam menyelesaikan pertikaian tidak hanya terbatas pada negara anggota PBB. Apabila terjadi pertikaian yang melibatkan negara yang bukan anggota PBB dan para pihak mengajukan pertikaian tersebut untuk diselesaikan oleh DK PBB, maka badan ini akan melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2, sekalipun pihak-pihak yang bertikai bukan anggota PBB, mereka tetap dapat membawa pertikaian mereka kepada DK atau Majelis Umum dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaan menerima kewajiban, sebagai akibat dari penyelesaian secara damai sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB. Para pihak sebisa mungkin menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara damai, baik melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak. Bila dianggap perlu, DK meminta para pihak untuk menyelesaikan dengan cara-cara demikian (Piagam PBB Pasal 33).

Keanggotaan PBB yang didirikan oleh 51 negara pendiri asli dan hingga kini telah berjumlah 193 negara bersifat terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan menerima kewajiban yang tertera dalam

Piagam PBB serta sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Piagam PBB Pasal 4 ayat 1). Sehingga dalam upaya memastikan terpenuhinya kewajiban dan dilaksanakannya seluruh peraturan organisasi sebagaimana yang telah diterima dan disepakati untuk dilaksanakan oleh negara anggota, maka organisasi internasional termasuk PBB memiliki tugas utama yaitu melakukan supervisi.¹¹

Supervisi memiliki tugas untuk menganalisis apakah telah terjadi pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Metode yang paling umum untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran dengan cara mengumpulkan informasi melalui kegiatan inspeksi atau pemeriksaan.¹² Hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa negara anggota telah melakukan pelanggaran peraturan organisasi internasional menjadi pertimbangan bagi organisasi internasional dalam menggunakan tekanan. Pemberian tekanan melalui sanksi merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk membujuk negara agar mematuhi kembali peraturan yang disepakati untuk dilaksanakan. Sanksi yang diberikan kepada negara anggota PBB yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menertibkan kembali negara anggota yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan di dalam Piagam PBB.

¹¹Henry G. Schemers and Niels M.Blokker. 2003. *International Institutional Law Unity Within Diversity*. Boston : Martinus Nijhoff Publisher . Hlm 873.

¹²*Ibid*. Hlm 888.

Terganggunya perdamaian dan keamanan internasional dapat diidentifikasi melalui tiga situasi, yaitu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Situasi seperti ini tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam Piagam PBB karena Piagam PBB ingin memberikan keleluasaan kepada DK kapan harus menetapkan dan merespon situasi tersebut.¹³ Situasi tersebut merupakan prasyarat bagi DK dalam memberikan rekomendasi atau memutuskan untuk mengambil tindakan-tindakan memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan di dalam Bab VII, Pasal 39 dan Pasal 41 Piagam PBB. Kedua pasal tersebut merupakan pasal kunci dalam pemberlakuan sanksi. Piagam PBB menegaskan bahwa tindakan DK dalam mengambil langkah-langkah non militer termasuk pemberlakuan sanksi hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi dan konsisten bahwa pemberlakuan sanksi bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴ Berdasarkan situasi ini, Dewan keamanan akan mempertimbangkan jenis sanksi, kombinasi sanksi¹⁵ termasuk pengecualian pemberlakuan sanksi. Secara umum sanksi Dewan Keamanan atas :

1. Sanksi ekonomi dan finansial

¹³Jeremy Matam Farral. 2007. *United Nations Sanction and the Rule of Law*. Cambridge Studies in International and Comparative Law: Cambridge University Press. Hal 64

¹⁴*ibid.* Hal 65.

¹⁵*Ibid.* Hal 106

Sanksi ekonomi bertujuan untuk mencegah aliran komoditas atau produk dari dan ke negara yang dikenai sanksi. Embargo atas ekspor dilakukan untuk melemahkan negara yang dikenai sanksi dengan menutup aksesnya terhadap suplai komoditas atau produk strategis. Sementara embargo atas impor bertujuan untuk menutup akses negara yang dikenai sanksi atas pertukaran nilai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional.¹⁶ Sanksi ekonomi meliputi sanksi ekonomi komprehensif,¹⁷ yang diberlakukan dengan pengecualian khusus dan sanksi ekonomi khusus¹⁸. Sanksi ekonomi khusus yang pernah diterapkan Dewan Keamanan PBB adalah :

- a) sanksi atas senjata
- b) sanksi atas senjata pemusnah masal
- c) sanksi atas minyak
- d) sanksi atas asbes, bijih besi, gula, kulit, krom, besi kasar, tembakau, tembaga, daging dan produk olahan daging.
- e) sanksi atas perdagangan alat pengangkutan: transportasi udara, darat dan air.
- f) sanksi atas berlian.

¹⁶Lung-Chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented*

Perspective. New Haven and London: Yale University Press. Hal 291

¹⁷Jeremy Matam Farral. *Op. Cit.* Hal. 106. Sanksi ekonomi komprehensif digunakan untuk menggambarkan pemberlakuan sanksi yang mencegah arus semua komoditas dan produk dari dan ke negara yang dikenai sanksi

¹⁸DK memberlakukan sanksi ekonomi khusus kepada rezim yang berbeda-beda dengan tujuan mencegah arus barang, produk atau komoditas tertentu dari dan ke negara yang dikenai sanksi.

- g) sanksi atas bahan-bahan kimia.
- h) sanksi atas kayu
- i) Sanksi atas barang – barang mewah .

Sanksi finansial fokus pada larangan arus keuangan dan sumber-sumber ekonomi dari dan ke negara yang dikenai sanksi termasuk pembekuan atau pengamanan aset negara yang dikenai sanksi.¹⁹

2. Sanksi non ekonomi

Sanksi non ekonomi merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi negara yang dikenai sanksi dalam melakukan hubungan dengan dunia luar di dalam kepentingan diluar perdagangan. Sanksi non ekonomi meliputi: sanksi diplomatik dan perwakilan, sanksi di bidang transportasi, sanksi perjalanan, sanksi di bidang penerbangan, sanksi di bidang olahraga, budaya dan ilmu pengetahuan, sanksi telekomunikasi.²⁰

2. Mekanisme Pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB

a. Penetapan Situasi (Pasal 39 Piagam PBB)

Sebelum menetapkan sanksi yang terwujud dalam resolusi DK PBB, DK harus melakukan pengamatan terhadap situasi yang

Lung-Chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented* Hal 45.

²⁰Jeremy Matam Farral. *Op. Cit* Hal 123

dikhawatirkan mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 Piagam PBB. Sebelum memberikan rekomendasi atau keputusan tentang tindakan dalam Pasal 39 Piagam PBB, DK dapat meminta para pihak untuk mematuhi tindakan sementara yang dianggap perlu atau diinginkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 40 Piagam PBB.²¹ Situasi yang harus ditetapkan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB sebelum DK melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 41 Piagam PBB (Piagam PBB Pasal 39) adalah:

1. Ancaman terhadap perdamaian.

Melalui beberapa resolusi, DK telah mengembangkan definisi yang lebih luas atas terminologi “ancaman terhadap perdamaian” yang antara lain meliputi perang saudara, pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme. Karena Piagam PBB tidak menyediakan definisi yang pasti mengenai ancaman terhadap perdamaian, maka untuk menetapkan apakah situasi merupakan ancaman terhadap perdamaian harus dilakukan sesuai dengan aturan umum interpretasi yang ditetapkan di dalam Konvensi Wina tentang perjanjian internasional. Terminologi ancaman terhadap perdamaian masih samar-samar dan tidak harus berhubungan dengan operasi militer atau operasi dengan kekerasan militer.²² Upaya

²¹Elias Davidsson. 2002. *Legal Boundaries to UN Sanction*. Published in the International Journal of Human Rights. Vol. 7. No. 4 Hal 1

²²Benedetto Conforti. 2005. *The Law and Practice of the United Nations*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher. Hal 172.

menetapkan ancaman terhadap perdamaian, DK merujuk pada latar belakang yang menunjukkan indikasi adanya ancaman. Ancaman terhadap perdamaian yang akan dikenai sanksi dapat dibedakan atas dua kategori besar, yaitu :

2. Ancaman dalam lingkup domestik Negara.

DK menetapkan situasi sebagai ancaman terhadap perdamaian dalam lingkup domestik negara yaitu ancaman yang timbul karena adanya krisis internal contohnya seperti adanya tindakan kaum rasis minoritas yang mencegah kaum mayoritas untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri, pemerintah yang menerapkan politik *apartheid*, terjadinya perang saudara dan tidak adanya entitas yang mengontrol pemerintahan, perampasan kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis, penggunaan kekuatan militer oleh kelompok pemberontak, krisis kemanusiaan yang serius dan pelanggaran hak fundamental kaum minoritas.

3. Ancaman berdimensi internasional

DK menetapkan situasi yang termasuk dalam kategori ancaman terhadap perdamaian yang lintas batas negara:

- a. Negara yang memiliki sejarah sebagai negara agresif dan berpotensi memiliki atau mengembangkan senjata pemusnah masal.

- b. Negara yang agresif dan berpotensi memiliki atau mengembangkan senjata pemusnah masal antara lain Afrika Selatan, Irak, Korea Utara dan Iran (Resolusi DK PBB No 687 Tahun 1991).

1. Teroris internasional

DK telah menetapkan teroris internasional sebagai ancaman terhadap perdamaian sebagaimana ditetapkan terhadap Libya dalam kasus pengeboman “Pan Am” dan UTA (Resolusi DK PBB No 731 Tahun 1992).

2. Konflik internasional

Konflik internasional antara Eritrea dan Etiopia pada tahun 1999 mengakibatkan peningkatan operasi militer di perbatasan kedua wilayah. DK selanjutnya menetapkan ancaman terhadap perdamaian (Resolusi DK PBB No 1226 Tahun 1999) dan menyerukan kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata.

3. Intervensi

Dalam kasus Yugoslavia (Serbia-Montenegro) tahun 1992, DK meminta dihentikannya intervensi atas Bosnia Herzegovina karena ditemukan ancaman terhadap perdamaian menyusul maraknya kekerasan terhadap rakyat Bosnia Herzegovina (Resolusi DK PBB No 757 Tahun 1992).

4. Pelanggaran perdamaian

Bentuk pelanggaran perdamaian yang pernah ditetapkan DK adalah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. DK selanjutnya mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran perdamaian dan meminta Irak untuk menarik diri tanpa syarat dari Kuwait (Resolusi DK PBB No 660 Tahun 1990).

5. Tindakan Agresi

Resolusi Majelis Umum No 3314 Tahun 1974 tentang definisi agresi menetapkan definisi agresi dalam Pasal 1 “penggunaan kekuatan senjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau independensi politik negara lain yang tidak sejalan dengan Piagam PBB

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan PBB

Kekuasaan organisasi internasional dalam menghasilkan keputusan dibatasi oleh ketentuan dalam konstitusi organisasi, sebab keputusan yang dihasilkan harus selalu berada dalam ruang lingkup kekuasaan organisasi.²³ Secara umum, proses pengambilan keputusan meliputi kegiatan mengkonsep sebuah keputusan, menetapkan landasan keputusan, hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, penetapan garis besar keputusan, pengadopsian sebuah

²³Henry G. Schermers and Niels M. Blokker. *Op. Cit.* Hal 493

keputusan baik melalui konsensus atau pemungutan suara dan pemberlakuannya²⁴ Pengambilan keputusan terkait pemberlakuan Resolusi DK dirancang dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tidak adanya penyalahgunaan kekuatan politik oleh DK. Mekanisme yang telah ada dapat lebih efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang meliputi prinsip transparansi, konsistensi, kesetaraan, adil dan proporsionalita

Keputusan untuk mengenakan sanksi-sanksi dilakukan dengan dua tahap pendahuluan, yaitu :²⁵

1. Mencari bukti pelanggaran kewajiban berdasarkan konstitusi atau konvensi lainnya. Bukti dapat diberikan dalam bentuk laporan melalui pemeriksaan atau berdasarkan pengaduan atau petisi.
2. Penentuan oleh organ yang berwenang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran.

Badan DK yang berwenang untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran dan membantu DK dalam menjalankan tugasnya adalah²⁶:

²⁴ *Ibid.* Hal. 491.

²⁵ D.W. Bowett. Q.C., LL.D. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Alih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Penerbit Sinar Grafika. Hal 189

²⁶ Anonim. *Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa* dalam <http://agama-kristen-protestan.id.kpt.co.id/> diakses tanggal 2 Oktober 2017

a. Komite Kontra Terorisme dan Non Proliferasi

Komite Kontra Terorisme didirikan berdasarkan Resolusi DK Nomor 1373 Tahun 2001 yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 Desember 2001 setelah terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik didalam wilayah mereka dan antar wilayah. Sedangkan Komite Non Proliferasi atau yang lebih dikenal dengan Komite 1540 adalah badan tambahan dari DK yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

b. Komite Staf Militer

Komite Staf Militer adalah badan pendukung DK yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.

c. Komite Sanksi.

Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi DK PBB tertentu, misalnya Komite DK dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada DK tentang pekerjaan, dan memeriksa serta mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.

d. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc

Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite DK tentang penerimaan anggota baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang pencegahan dan resolusi konflik di Afrika. Komite DK tentang penerimaan anggota baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang pencegahan dan penyelesaian konflik di Afrika, memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara DK dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB yang berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.

e. Operasi Perdamaian

Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

f. Pengadilan Internasional

DK PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-

orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 hingga 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.

g. Komisi Pembangunan Perdamaian

Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat DK PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas masyarakat internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pascakonflik dan pemulihan serta jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negara-negara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.

Setelah menetapkan situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 Piagam PBB, proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh DK yang merujuk kepada konstitusi organisasi, Piagam PBB Pasal 27:

1. Setiap anggota DK memiliki satu suara.
2. Keputusan-keputusan DK mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota.
3. Keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari 9 anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI dan menurut Pasal 52 ayat 3, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya.

Untuk memberlakukan sebuah resolusi, pengambilan keputusan harus memenuhi suara bulat dari sembilan negara anggota termasuk negara dengan status anggota tetap DK PBB. Setiap anggota tetap DK memiliki hak veto yang merupakan terminologi yang sering digunakan terkait dengan Pasal 27 ayat 3 yang menetapkan bahwa pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat substansif atau non prosedural

harus dilakukan dengan suara bulat²⁷ dengan kata lain veto dapat menggugurkan pemberlakuan sebuah keputusan. Pengambilan suara dengan bulat oleh anggota tetap DK PBB merupakan hal yang sangat esensial.²⁸

Secara singkat, langkah-langkah DK dalam mengeluarkan resolusi adalah sebagai berikut:²⁹

1. Inisiatif setiap negara agar DK mengeluarkan resolusi terhadap negara lain dapat dilakukan dengan mengajukan draft resolusi dalam sebuah pertemuan tidak resmi DK. Pertemuan tidak resmi merupakan sarana untuk mencapai sebuah kesepakatan diluar sidang resmi sebelum akhirnya dibawa ke sidang resmi DK.
2. Setelah draft resolusi dipaparkan dalam pertemuan tidak resmi, selanjutnya akan dilakukan perundingan secara individual dalam rangka menyatukan pandangan dan untuk mengetahui siapa saja yang pro dan kontra dengan draft resolusi yang diajukan.
3. Bila berjalan lancar, selanjutnya dalam pertemuan tidak resmi ini akan menerima dan menyetujui draft resolusi yang

²⁷Jacques Fomerand. 2009. *The A to Z of the United Nations*. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc. Hal. 381.

²⁸Piagam PBB Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara eksplisit kekuatan “Veto” yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB. Namun keputusan yang dikeluarkan DK membutuhkan suara bulat dari anggota tetap untuk mengadopsi suatu keputusan menjadi sebuah resolusi. Piagam PBB menetapkan bahwa keputusan tidak dapat diambil apabila satu dari anggota tetap menolak keputusan.

²⁹Nugroho Wisnumurti dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. *Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 64.

- sebelumnya menggunakan tinta biru menjadi sebuah draft resolusi resmi DK yang selanjutnya menggunakan tinta hitam.
4. Draft resolusi resmi yang telah disepakati selanjutnya dibawa ke sidang resmi DK dan diedarkan kepada semua anggota DK dan pengambilan suara menjadi agenda selanjutnya.
 5. Apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam sidang resmi DK, negara masih dapat meminta sidang resmi DK melaksanakan pengambilan suara walaupun dapat diperkirakan adanya veto dari anggota tetap DK
 6. Sebaliknya apabila sidang resmi DK menghasilkan kesepakatan atas draft resolusi tersebut, maka draft resolusi resmi akhirnya diadopsi secara konsensus atau secara aklamasi. Ada kalanya negara memberikan penjelasan mengenai “vote” untuk memberikan justifikasi dan menjelaskan latar belakang setuju atau tidak atas suara yang diberikan.

Draft resolusi akan disempurnakan dalam sidang DK. Proses penyempurnaan dilakukan secara bersama-sama, negara anggota akan membahas, memberikan masukan serta komentar. Setelah itu pembahasan draft resolusi akan di finalisasi untuk kemudian diberlakukan.³⁰

³⁰A. Anindityo Adi Primasto dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 65.

4. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

a. Pengertian Yurisdiksi menurut Hukum Internasional

Yurisdiksi dimiliki oleh setiap Negara yang berdaulat untuk menunjukkan kewenangannya pada dunia internasional terutama pada rakyatnya sendiri. Yurisdiksi sendiri merupakan cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Setiap negara yang berdaulat dan tentunya memiliki yurisdiksi³¹ memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam wilayahnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Yurisdiksi suatu Negara memiliki keistimewaan dimana negara lain tidak dapat turut campur dalam terhadap urusan dalam negeri suatu negara, dan sebaliknya suatu negara tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri dari negara lain. Hal ini juga ada prinsip tersendiri dalam penerapannya. Prinsip dalam pelaksanaan yurisdiksi suatu negara yaitu “*par in parem non habet imperium*”.³² Prinsip hukum “*par in parem non habet imperium*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan

³¹ Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung : Nusamedia. Hlm. 56.

³² Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 183.

yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.³³

b. Tanggung-jawab Negara

Tanggung jawab negara adalah prinsip dasar hukum internasional, yang timbul dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan Negara. Tanggung jawab negara mempunyai kewajiban untuk memberikan reparasi apabila Negara tersebut melakukan kesalahan berdasarkan hukum internasional.³⁴

Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC), sebuah badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1947, melakukan studi dan kodifikasi soal tanggung jawab negara. Di mulai sejak tahun 1953, studi tentang tanggung jawab negara yang dilakukan oleh ILC akhirnya berhasil rampung setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2001 melalui Resolusi

³³ Huala Adolf. *Ibid.* Hlm. 184.

³⁴ *Perjanjian Internasional*.

<http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2E%20Makalah%20Perjanjian%20Internasional.pdf>, 16 November 2017

56/83. Hasil studi ILC ini berbentuk draft artikel yang berjudul, “*Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*”.

Dalam draft artikel tanggung jawab negara yang berhasil dirampungkan oleh ILC tidak memberikan definisi tentang tanggung jawab negara. Pasal 1 draft artikel tersebut hanya memberikan penjelasan kapan tanggung jawab negara timbul, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan yang salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan dikatakan salah secara internasional apabila memenuhi dua elemen yaitu berdasarkan hukum internasional ia dapat diatribusikan kepada negara tersebut dan melahirkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional.³⁵

Pelanggaran kewajiban internasional terjadi apabila tindakan negara tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kewajiban itu sendiri.³⁶

c. Pengertian Pembajakan dan armed robbery.

Pembajakan, menurut hukum internasional, adalah kejahatan tertua yang masuk ke dalam yurisdiksi universal . Selama berabad-abad, banyak negara telah bersepakat untuk menganggap bajak laut menjadi *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), sehingga setiap negara dapat menggunakan hukum-hukum domestiknya sendiri untuk mencoba

³⁵Huala Adolf. Ibid. Hlm. 219

³⁶J.G Starke. 1992.*Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 184.

menghukum mereka yang melakukan pembajakan, terlepas dari kebangsaan bajak laut atau di mana tindakan pembajakan berlangsung

Perompakan Kapal adalah salah satu bentuk dari kejahatan maritim. Istilah perompakan kapal atau "pembajakan" memiliki pengertian yang beraneka ragam, baik pengertian yang sifatnya akademis atau praktis maupun definisi yang telah menjadi suatu pedoman yuridis dan telah disepakati oleh negara-negara berdaulat di dunia. Namun jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perompak kapal dengan perompak kapal dengan pencurian di laut, perampokan di atas kapal, kejahatan teroris melalui kapal atau penyelundupan. Oppenheim memberikan pengertian tentang pembajakan atau *piracy* : "Perompakan kapal, dalam makna aslinya adalah setiap perbuatan kekerasan yang melawan hukum yang dilakukan oleh suatu kapal tertentu terhadap kapal lainnya di laut bebas dengan maksud untuk mengambil alih barang berharga secara tidak sah." Sedangkan Merriam-Webster mendefinisikan:

"Perompakan kapal atau "pembajakan" sebagai suatu tindakan kriminal perampokan di laut bebas, atau suatu perilaku kriminal yang menyerupai perampokan yang terjadi di laut bebas." Menurut Harvard *Research Draft Convention on Piracy* artikel 3 memberikan pemahaman tentang pembajakan sebagai berikut : "Setiap tindakan kekerasan atau perusakan yang dilakukan dengan maksud untuk merampok, memperkosa, memenjarakan atau membunuh, memperbudak, melukai seseorang atau dengan maksud untuk mencuri atau merusak barang berharga dengan motif untuk memiliki barang berharga tersebut secara

tidak sah, dimana tindakan tersebut terkait dengan suatu penyerangan daari laut atau dari udara.”Untuk definisi tentang pembajakan yang memiliki implikasi yuridis, kita dapat mengacu pada UNCLOS 1982 pasal 101, yakni : Perompakan kapal (Pembajakan) terdiri atas tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Setiap perbuatan dengan kekerasan secara tidak sah atau penahanan atau setiap perbuatan yang merusak yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang berharga milik orang secara tidak sah yang dilakukan oleh kru atau penumpang dari suatu kapal dan dilakukan :
- b) Di laut bebas terhadap kapal lainnya atau terhadap seseorang atau barang berharga yang ada diatas kapal.
- c) Terhadap suatu kapal, seseorang atau barang berharga di luar jurisdiksi dari suatu negara tertentu.
- d) Setiap perbuatan turut-serta yang dilakukan secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal yang diketahui perilaku secara nyata sebagai kapal perompak.
- e) Setiap perbuatan yang mendorong atau memfasilitasi suatu perbuatan melawan hukum sebagai tersebut dalam item a atau b di atas.”

Selanjutnya pada pasal 102 diatur bahwa tindakan-tindakan perompakan kapal sebagaimana tersebut di atas, apabila dilakukan oleh kapal perang, kapal milik pemerintah atau pesawat milik pemerintah dimana krunya menguasai dan mengendalikan suatu kapal tertentu,

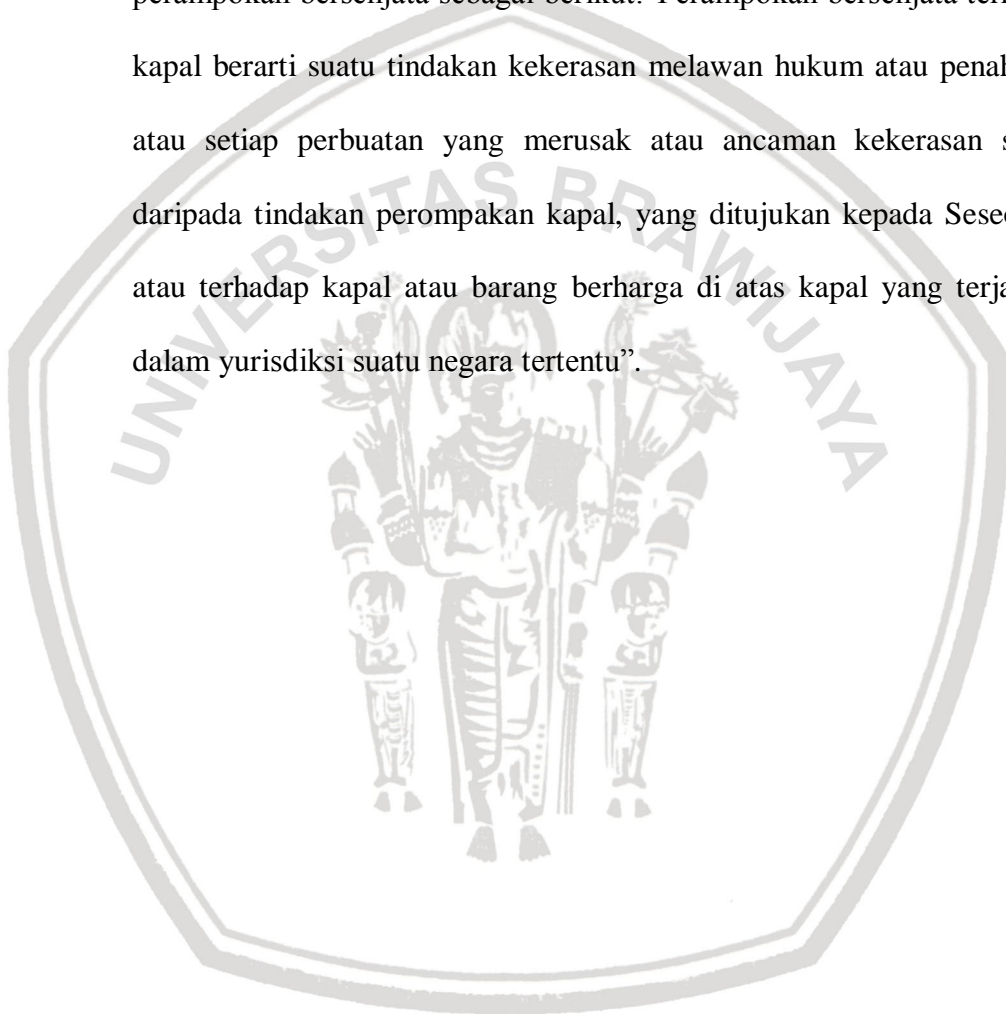
disamakan dengan suatu tindakan perompakan yang dilakukan oleh kapal swasta. Sedangkan yang dimaksud dengan kapal perompak adalah suatu kapal yang dikuasai oleh orang-orang yang menggunakannya untuk tujuan melakukan salah satu tindakan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 101 di atas. Hal ini berlaku juga atas kapal yang digunakan untuk tindakan perompakan tersebut, sepanjang kapal itu masih dikendalikan atau dikuasai oleh orang-orang yang diputuskan bersalah karena tindakan perompakan kapal. Di laut bebas ataupun di suatu wilayah perairan yang berada di luar yurisdiksi suatu negara tertentu, setiap negara dapat menahan sebuah kapal perompak atau kapal yang diambil dan atau dikuasai oleh para perompak dan menahan orang-orang yang terlibat sekaligus menyita barang-barang yang ada di atas kapal. Pengadilan dari negara yang menahan kapal perompak dapat menjatuhkan hukuman serta menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil terkait dengan kapal perompak tersebut, dengan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga berdasarkan itikad baiknya. Yang berhak melakukan penahanan atas dasar dugaan perompakan kapal adalah kapal perang atau kapal militer dan atau kapal yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Namun apabila penahanan dari negara tertentu berdasarkan suatu kecurigaan yang tidak memiliki dasar yang kuat, maka negara penahan tersebut wajib bertanggung jawab atas kesalahan penahanan dengan membayar ganti rugi kepada negara dimana bendera kapal digunakan atas kerugian atau kerusakan yang diderita. Definisi hukum mengenai apa yang dimaksud

dengan perompakan kapal yang tercantum dalam UNCLOS di atas telah menjadi hukum positif yang diterima secara luas oleh bangsa-bangsa di dunia. Akibat yang ditimbulkan oleh konvensi hukum laut Internasional di atas terkait dengan masalah perompakan kapal telah membatasi makna perompakan itu sendiri sebagai suatu kondisi dimana terdapat dua kapal yang terlibat dalam perompakan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan perompakan tersebut harus terjadi di perairan Internasional. Walaupun terdapat kelemahan yurisdiksi sebagaimana disinggung oleh Gauci (2002), yang menyatakan bahwa UNCLOS pasal 101 itu merupakan definisi yang relatif dangkal/sempit, dimana tindakan kekerasan lainnya di laut yang tidak memiliki motif ekonomis seperti terorisme ataupun tindakan kejahatan di laut yang terjadi dalam laut teritorial suatu negara tidak masuk dalam kategori tindakan pembajakan.

Namun demikian, dari sudut pandangan hukum Internasional, apa yang didefinisikan dalam UNCLOS 1982 tentang pembajakan adalah suatu yang telah diterima dan disepakati oleh banyak Negara-negara di dunia. Konsep hukum di atas, sesuai dengan keyakinan universal bahwa perompakan kapal (pembajakan) adalah *hostis humani generis*, kejahatan terhadap kepentingan bersama umat manusia, dimana setiap negara dapat menghukum siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan Perompakan kapal dimanapun di dunia ini. Akibat selanjutnya adalah berbagai kejahatan yang terjadi terhadap kapal yang mirip dengan perompakan kapal/piracy dan terjadi dalam perairan teritorial maupun perairan dalam

suatu negara seperti diarea pelabuhan atau di sungai, bukan dikategorikan sebagai suatu tindakan perompakan kapal/pembajakan.

Untuk memberikan suatu solusi praktis, dikembangkan suatu istilah yang dinamakan dengan perampokan bersenjata (armed-robbery at sea).IMO mernberikan batasan definisi tentang apa yang dinamakan dengan perampokan bersenjata sebagai berikut:“Perampokan bersenjata terhadap kapal berarti suatu tindakan kekerasan melawan hukum atau penahanan atau setiap perbuatan yang merusak atau ancaman kekerasan selain daripada tindakan perompakan kapal, yang ditujukan kepada Seseorang atau terhadap kapal atau barang berharga di atas kapal yang terjadi di dalam yurisdiksi suatu negara tertentu”.





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana dan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian perlu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang diolah. ¹Metode Penelitian adalah cara untuk melakukan peneletian maka penulis menggunakan cara cara sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative yaitu merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penelitian penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian yang hanya dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sata sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²

Adapun penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perjanjian Internasional dan Prinsip Hukum internasional (*Statue Approach*) dan menggunakan pendekatan kasus normatif (*Chase Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan ataupun memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Sementara itu pendekatan kasus (*Chase Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari kasus – kasus yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dan berhubungan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

b. Pendekatan Penelitian

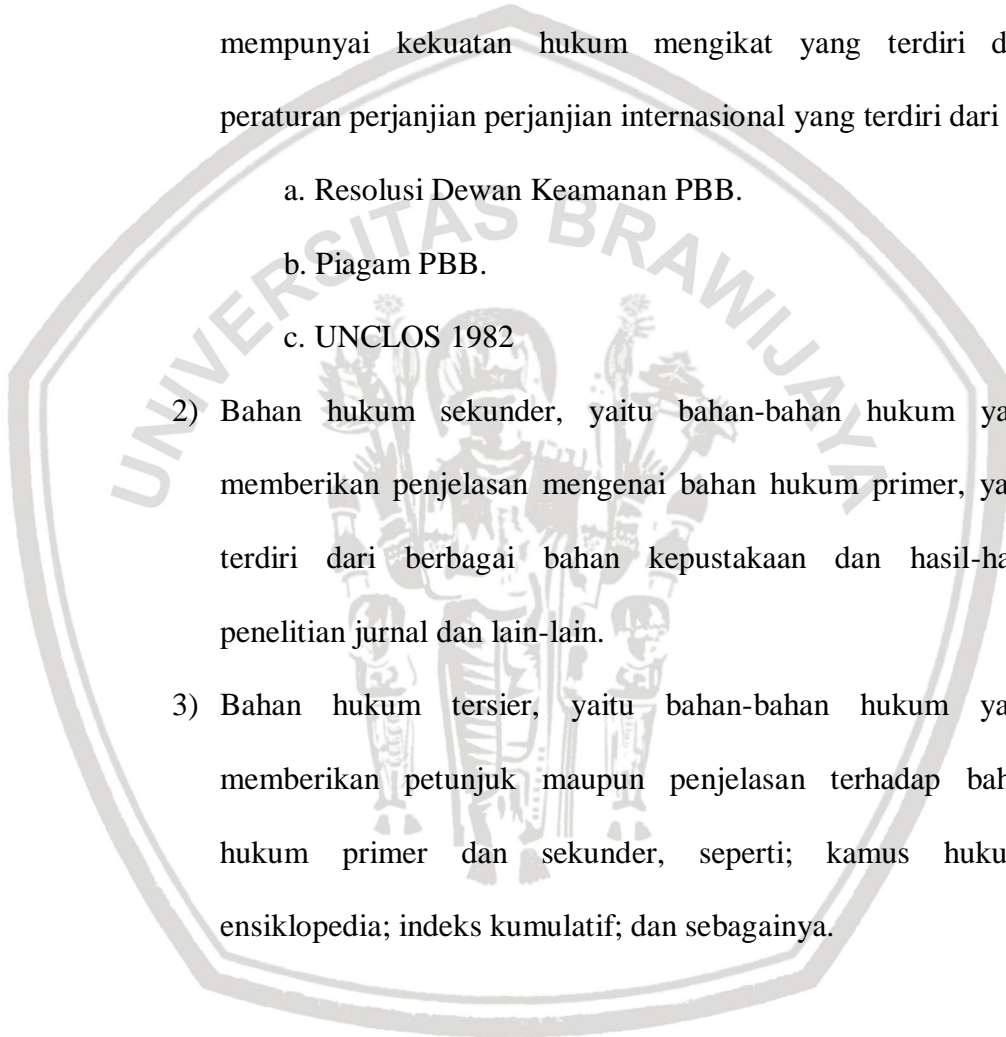
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perjanjian Internasional dan Prinsip Hukum Umum (*statue approach*) dan mengkaji kasus yang tepat (*Chase approach*) yaitu berdasarkan kasus kasus dan kejadian yang berkembang dalam ilmu hukum.

²*Ibid.*, hlm.13-14.

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perjanjian internasional yang terdiri dari :
 - a. Resolusi Dewan Keamanan PBB.
 - b. Piagam PBB.
 - c. UNCLOS 1982
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan hasil-hasil penelitian jurnal dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum; ensiklopedia; indeks kumulatif; dan sebagainya.



D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa, dan mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisa Bahan Hukum yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimanadasar pengetahuan umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudia ditarik suatu kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normative yaitu dengan melakukan penjabaran atas data-data yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti. Pendekatan semacam ini dilakukan dengan meneliti realitas hukum dari segi yuridis sehingga dapa ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang ada .

f. Definisi Konseptual

Merupakan batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, literatur, dan pendapat ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yakni:

- a. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yg ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.
- b. Armed Robbery adalah pembajakan di luar laut teritorial yang dilakukan oleh nahkoda atau awak kapal yang mengetahui kapalnya digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan ditengah laut

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2383 Terhadap Somalia.

1. Kekuatan Hukum dari Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sesuai dengan pasal 103 piagam PBB, kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional lainnya, terlepas dari apakah sebelum atau sesudah adopsi piagam tersebut diterapkan.¹ Mengomentari ketentuan ini, McNair menegaskan bahwa piagam tersebut paling dekat dengan undang – undang seluruh komunitas Negara yang pernah terwujud.² Dia menyampaikan bahwa ketentuan-ketentuannya yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum memiliki karakter konstitutif atau semi legislatif, dan bahwa Negara Negara anggota tidak dapat menambahkan atau mengurangi darinya dengan perjanjian dan bahwa setiap perjanjian dimana mereka berusaha untuk menghilangkan efek dari resolusi ini tidak berlaku³. Namun cakupan penuh pasal ini hanya dapat dipahami jika praktik selanjutnya dalam hal ini dipertimbangkan dengan tepat.

¹Franck, 'is the UN Charter is a Constitution ?'. hal.7.

²A.D McNair, *The Law of Treaties*. Oxford, Claredon press, 1961, hal. 217.

³ *Ibid*.

Pasal 103 mengacu pada kewajiban berdasarkan kesepakatan lain yang memicu perdebatan mengenai apakah peraturan tersebut juga sampai pada hak dan hukum kebiasaan internasional. Sarjana tampak tetap terbagi atas topik ini Bedjaoui, yang berpendapat bahwa pembakaran di *Lockerbie*,⁴ menjawab yang negatif, hal itu tidak berhasil mengalahkan hak hukum, juga berlaku juga pada hukum kebiasaan.⁵ Namun, interpretasi itu nampaknya terlalu formalistik dan dibantah. Dengan hirarki perjanjian dan kebiasaan yang sama digunakan sebagai sumber hukum internasional, nampaknya tidak masuk akal untuk menduga bahwa piagam tersebut berlaku lebih dulu daripada yang sebelumnya tapi bukan yang terakhir.⁶

Mengacu pada kontroversi yang tepat, terjalinya antara hak dan kewajiban membuat sulit untuk masalah tersebut secara terpisah. Mengambil aturan ekstradisi dan tuntunan hukum dibawah konvensi montreal,⁷ yang merupakan subjek review Bedjaoui yang mendukung pendapatnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sesuai dengan pasal 7 :

Negara yang mengontrak di wilayah yang diduga

⁴Question of interpretation and Application of the 1971 Montrel Convention Arrising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom and United States of America) , Provisional Measures. 1992 ICJ reports 3 (ICJ 1992).

⁵Ibid., 143 ; V. Gowlland- Debbas, 'security council enforcement action and issues of states and responsibility,*international and Comparative Law Quartely* ,hal 148.

⁶ D.Schweighman, The Authority of the Security Council Under Chapter VII of the UN Charter : Legal Limits and the Role of the International Court of Justice , The Hague, Martinus Nijhoff, 2001, hal.195 dan 196.

⁷Konvensi Untuk Penekanan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil. U.N.T.S. 974 (September 23, 1971) 178.

ditemukan oleh pelaku, jika tidak mengekstradisi dia, diwajibkan, tanpa kecuali apapun dan apakah pelanggaran tersebut dilakukan di wilayahnya atau tidak, untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan penuntutan.⁸

Resolusi dewan keamanan sering secara implisit meminta pasal 103 , menegaskan bahwa resolusi tersebut berlaku untuk hak- hak tetapi tanpa membuat referensi tegas mengenai hukum kebiasaan. Mereka biasanya menggunakan formula standar '*calling upon*' atau '*deciding*' bahwa semua Negara dan Organisasi Internasional harus 'bertindak secara ketat sesuai dengan ketentuan resolusi saat ini, terlepas dari adanya hak atau kewajiban yang diberikan atau diberlakukan oleh perjanjian internasional'.⁹ Meskipun demikian, dalam praktiknya, resolusi menggantikan norma kebiasaan yang bertentangan. Pendapat Negara-negara Anggota tidak seragam seperti yang dijelaskan oleh krisis Lockerbie, ketika banyak negara menegaskan bahwa resolusi Dewan Keamanan hanya mencapai kesepakatan internasional sementara yang lain jelas-jelas tidak setuju.

Kewajiban Resolusi, terutama jika mengadopsi tindakan penegakan hukum, seringkali berdampak pada kontrak, lisensi,

⁸Ibid , pasal 7.

⁹UNSC, 'Repertoire (1993-1995) Bab XII - Pertimbangan Ketentuan Piagam Artikel Lainnya' hal. 1202; 'Repertoire (1996-1999) Bab XII - Pertimbangan Ketentuan Piagam Artikel Lain' hal. 1248 et seq; 'Repertoire (2000-2003) Bab XII - Pertimbangan Ketentuan Piagam Artikel Lainnya' hal. 1078 et seq; dan 'Repertoire (2004-2007) Bab XII - Pertimbangan Ketentuan Piagam Artikel Lain' [Pada 19 Februari 2018] hal. 137 et seq.

perizinan dan instrumen hukum perdata lainnya. Untuk tetap mengikuti satu dari sekian banyak contoh, resolusi 1306 (2000) memutuskan bahwa semua Negara harus 'mengambil tindakan yang diperlukan untuk melarang impor langsung atau tidak langsung dari semua berlian mentah dari Sierra Leone ke wilayah mereka', 'tidak dengan-berdiri keberadaan setiap hak atau kewajiban yang diberikan atau dipaksakan oleh kontrak yang dimasuki atau izin atau izin yang diberikan sebelum 'keputusan tersebut'.¹⁰Selanjutnya, kata-kata '*calling upon*' atau '*deciding*' bahwa semua Negara dan Organisasi Internasional harus 'bertindak secara ketat sesuai dengan ketentuan resolusi saat ini, terlepas dari adanya hak atau kewajiban yang dikuasai atau dipaksakan oleh perjanjian internasional atau kontrak manapun yang ditandatangani atau izin apapun 'telah menjadi standar'.¹¹Apa arti kata 'berlaku' dalam Pasal 103? Meskipun komentarnya tidak sama, interpretasi teleologis dari ketentuan ini diadopsi. Pasal 103 bertujuan untuk 'menjamin bahwa kewajiban Piagam dapat dilakukan secara efektif dan tidak menghapus rezim perjanjian lainnya, namun kemungkinan terjadinya konflik dapat terjadi'.¹²Hal ini disampaikan bahwa alasan yang sama berlaku untuk norma adat dan, pada prinsipnya, terhadap kewajiban yang timbul dari instrumen hukum swasta. Singkatnya, sebuah resolusi wajib dapat

¹⁰International Law Commission, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, Finalized by Martti Koskenniemi*, New York, United Nations, 13 April 2006, 176.

¹¹UNSC, 'Repertoire (1996-1999) Bab XII - Pertimbangan Ketentuan Pasal-pasal lain dalam Piagam' hal. 1249-1251. *Ibid*.

¹²resolusi DK PBB 1306 (2000), paragraf 1 dan 9.

menciptakan kewajiban kepada Negara-negara Anggota dan Negara-negara Bukan Anggota, dan juga pihak pihak non-negara, termasuk perorangan. Kewajiban tersebut menimpa hak atau kewajiban yang bertentangan dari perjanjian atau sifat kebiasaan, peraturan dan kontrak domestik dan instrumen privat lainnya. Bagian selanjutnya beralih ke pertanyaan tentang penentuan apakah Dewan telah menggunakan kekuatan wajibnya dalam kasus tertentu.

2. Ketentuan UNCLOS 1982 tentang Pembajakan dan Armed Robbery.

Hukum pembajakan internasional diatur dalam Pasal 100 sampai 107 dan 110 dari Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS). Fakta bahwa Artikel-artikel ini mengulang hampir secara harfiah Pasal 14 sampai 22 dari Konvensi Jenewa tahun 1958, dan bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan juga Israel, Swiss dan Venezuela, walaupun tidak terikat oleh UNCLOS, terikat oleh Konvensi Jenewa, mensyaratkan bahwa, sebagai masalah hukum kebiasaan atau konvensional, Artikel ini menyatakan undang-undang yang berlaku saat ini.

Untuk tujuan sekarang ini nampaknya perlu dan cukup untuk mengingat ketentuan mengenai definisi pembajakan dan tindakan melawan pembajakan. Mengenai definisi tersebut, aspek utamanya adalah bahwa pembajakan terdiri dari 'tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh kru atau penumpang kapal atau pesawat pribadi dan diarahkan ... di laut lepas terhadap kapal lain atau pesawat terbang, atau terhadap orang atau harta benda di atas. Mengenai

tindakan yang mungkin dilakukan terhadap kapal bajak laut, terlepas dari hak kapal perang semua negara untuk menggunakan hak untuk mengunjungi bertujuan untuk memastikan apakah sebuah kapal terlibat dalam pembajakan, kapal atau pesawat terbang tersebut.¹³

Mengenai tindakan yang mungkin dilakukan terhadap kapal bajak laut, terlepas dari hak kapal perang semua negara untuk menggunakan hak untuk mengunjungi bertujuan untuk memastikan apakah sebuah kapal terlibat dalam pembajakan,¹⁴ Ketentuan utamanya adalah Pasal 105 yang menyatakan:

‘Di laut lepas, atau disetiap tempat lain di luar yurisdiksi Negara manapun setiap Negara dapat menyita suatu kapal atau pesawat udara perompak atau suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh perompak dan berada di bawah pengendalian perompak dan menangkap orang-orang yang menyita barang yang ada di kapal. Pengadilan Negara yang telah melakukan tindakan penyitaan itu dapat menetapkan hukuman yang akan dikenakan, dan juga dapat menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang, dengan tunduk pada hak-hak pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik.’

¹³ UNCLOS pasal 105.

¹⁴ UNCLOS pasal 101(a)

Definisi pembajakan agak sempit, karena hanya mencakup tindakan di laut lepas dan hanya tindakan yang dilakukan oleh satu kapal terhadap kapal lain. Jadi bentuk kekerasan dilakukan di laut teritorial serta tanpa melibatkan dua kapal, misalnya, penguasaan kapal yang dilakukan oleh anggota awak kapal atau penumpangnya, bahkan saat tindak lanjut terdiri dari penangkapan untuk menebus kapal beserta kru dan penumpangnya, tidak termasuk. Dengan benar, pengambilan kendali oleh pembajak memulai sebagai penumpang kapal Portugis Santa Maria pada tahun 1961 dan di kapal pesiar Italia Achille Lauro pada tahun 1985, yang memiliki liputan pers yang luas, tidak dianggap sebagai pembajakan. Kegiatan kekerasan terhadap kapal-kapal di lepas pantai Somalia kadang terjadi secara keseluruhan atau sebagian di laut teritorial, sehingga seringkali tetap berada di luar lingkup definisi. Lebih jarang lagi mereka tidak melibatkan kehadiran satu atau lebih kapal lain, karena biasanya kapal pesiar yang sangat cepat digunakan, berasal dari basis di daratan atau dari 'kapal induk' di laut. Mungkin digarisbawahi bahwa tindakan persiapan untuk pembajakan dan tindakan kekerasan lainnya yang tidak terkait langsung dengan pembajakan tidak termasuk dalam definisi.

Sejauh tindakan yang diambil terkait, di bawah Pasal 105 bendera negara dari kapal yang dikuasai menikmati kekuatan yang sangat luas. Ini terdiri dari hak untuk menangkap orang dan untuk merebut properti, dan, melalui hak di atas, untuk memutuskan hukuman dan tindakan yang harus diambil sehubungan dengan kapal, pesawat terbang dan properti, hak untuk menyerahkan orang-orang yang ditangkap dan harta benda

tersebut disita untuk proses peradilan. Dengan kata lain, yurisdiksi universal pengadilan negara yang disita didukung oleh hukum internasional. Bahasa Pasal 105 ('boleh') nampaknya menunjukkan bahwa pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan negara yang merampas adalah sebuah kemungkinan, bukan suatu kewajiban, terlepas dari 'kewajiban' untuk bekerja sama dalam penindasan pembajakan yang diatur dalam Pasal 100. Namun, peraturan di Pasal 105 tidak menetapkan yurisdiksi eksklusif pengadilan negara pengambilalihan. Pengadilan negara-negara lain tidak dilarang melakukan yurisdiksi berdasarkan kondisi yang mereka tetapkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan internasional mengenai tindakan yang harus diambil untuk melawan tindakan perompakan bajak laut, namun jauh dari memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara efektif.

3. Resolusi Dewan Keamanan Yang Berkaitan dengan Pembajakan.

Dengan Resolusi 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 dan yang lainnya yang mengikutinya, khususnya Resolusi 1846 pada tanggal 2 Desember 2008 dan 1851 pada tanggal 18 Desember 2008, Dewan Keamanan telah berusaha untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran yang disebabkan oleh aktivitas bajak laut di lepas pantai Somalia. Ini telah mengambil tindakan dalam kerangka Bab VII yang bertujuan untuk memperbaiki batasan-batasan peraturan hukum internasional di atas, sejauh penerapannya terhadap situasi yang dihadapi diperhatikan.

Resolusi ini, saat menggunakan istilah 'pembajakan', jangan mendefinisikan seperti itu. Referensi terhadap ketentuan UNCLOS dan pernyataan bahwa ketentuan ini 'memberikan prinsip panduan untuk kerja sama semaksimal mungkin dalam penekanan pembajakan' menunjukkan bahwa titik awal adalah definisi yang diingat di atas dalam Konvensi. Dalam Resolusi ini, bagaimanapun, selalu menyebutkan 'armed robbery' bersamaan dengan pembajakan. *Armed Robbery* tidak didefinisikan. Ini adalah istilah yang secara rutin digunakan dalam kerangka IMO, dan dapat dipahami mencakup semua tindak kekerasan yang tujuannya identik atau mirip dengan pembajakan namun tidak tercakup dalam definisi konvensional, terutama karena hal itu dapat dilakukan tanpa menggunakan kapal melawan kapal target.¹⁵ Menurut bahasa International Maritime Organisation 'Armed Robbery', bagaimanapun, hanya mengacu pada kegiatan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi sebuah negara, sehingga tidak memperluas cakupan ketentuan pembajakan terhadap tindakan yang dilakukan di laut lepas kecuali dua kapal hadir. Inilah yang dilakukan Resolusi Dewan

¹⁵IMO Res A 922 (22) tanggal 29 November 2001. Mengadopsi Kode Praktik untuk Investigasi Kejahatan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal: '[a] perampokan yang ketat terhadap kapal berarti tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah atau tindakan apapun dari penyusutan, atau ancaman daripadanya, selain tindakan "pembajakan" yang ditujukan terhadap sebuah kapal atau terhadap orang atau harta benda di atas kapal tersebut di dalam yurisdiksi negara atas pelanggaran tersebut; definisinya hampir secara harfiah diulang dalam Art. 1 (2) Perjanjian Kerjasama Regional untuk memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di Asia pada tanggal 28 April 2005, 44 ILM (2005) 829; dan di Art. 1 (2) Kode Perilaku IMO yang disponsori mengenai Repression of Pembajakan and Armed Robbery Against Ships di Samudera Hindia Barat dan Teluk Aden, diadopsi di Djibouti pada tanggal 29 Januari 2009, tersedia di: www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=1773&doc_id=10933 (dikunjungi pada 20 Februari 2009). Teks sementara dari instrumen ini, yang referensi dibuat dalam artikel ini, tercantum dalam Lampiran 7 ke dokumen IMO. C 100/7, 25 Apr. 2008, Laporan pertemuan Sub-regional mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di wilayah Samudra Hindia Barat, Teluk Aden dan Laut Merah.

Keamanan, karena mereka menggunakan ungkapan 'pembajakan dan *Armed Robbery* terhadap kapal-kapal di perairan teritorial Somalia dan laut lepas di lepas pantai Somalia'.¹⁶Karena dua atau lebih kapal terlibat dalam sebagian besar kasus Somalia, penyebutan '*Armed Robbery*' tampaknya tidak didikte secara ketat oleh kebutuhan praktik yang ada, dan lebih diilhami oleh tujuan untuk memasukkan semua tindakan yang terkait dengan pembajakan (seperti sebagai tindakan persiapan) dan kemungkinan tindakan di masa depan yang hanya melibatkan satu kapal.

Elemen terpenting dalam Resolusi diatur dalam paragraf 7 Resolusi 1816. Itu mengatasi pembatasan definisi pembajakan terhadap tindakan yang dilakukan di laut lepas yang seperti disebutkan, membuatnya tidak memadai untuk menangani tindakan yang kadang-kadang terjadi secara keseluruhan. di laut teritorial, dan sangat sering termasuk serangan di laut lepas yang diikuti oleh kapal bajakan yang dibawa oleh bajak laut ke laut teritorial dan ditahan untuk mendapatkan uang tebusan di pelabuhan atau di dekat pantai, atau dengan mengendarai kapal pesiar 'mundur ke perairan teritorial dan internal Somalia.

Elemen terpenting ini adalah bahwa beberapa negara diberi wewenang untuk:

- (a) Memasuki perairan teritorial Somalia untuk tujuan menekan tindakan pembajakan dan *Armed Robbery* di laut, dengan cara yang sesuai dengan tindakan yang diizinkan di

¹⁶Res. 1816, penultimate preambular para.; res. 1846, penultimate preambular para

laut lepas sehubungan dengan pembajakan menurut hukum internasional yang relevan;

(b) Gunakan, di perairan teritorial Somalia, dengan cara yang sesuai dengan tindakan yang diizinkan di laut lepas sehubungan dengan pembajakan menurut hukum internasional yang relevan, semua cara yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan dan *Armed Robbery*.

Efek dasarnya dari ketentuan ini adalah membuat peraturan internasional mengenai pembajakan di laut lepas yang berlaku juga untuk perairan teritorial, antara lain mengizinkan usaha dari laut lepas ke perairan ini, dan mengklarifikasi bahwa negara-negara yang bertindak berdasarkan peraturan ini di perairan teritorial Somalia dapat menggunakan 'semua sarana yang diperlukan'.

Mungkin ditambahkan bahwa - setelah sebuah episode di mana pasukan Prancis mengejar bajak laut ke daratan Somalia.¹⁷ Resolusi 1851 ditambahkan pada tanggal 16 Desember 2008 sebuah kewenangan untuk melakukan 'semua tindakan yang diperlukan yang sesuai di Somalia

¹⁷Ini adalah operasi yang dilakukan pada 11 April 2008 di wilayah Somalia yang berhasil menangkap 6 dari bajak laut, dan sebagian dari uang tebusan yang dikumpulkan dalam operasi pembajakan terhadap penumpang kapal pesiar Prancis Le Ponant, dibebaskan di laut oleh pasukan Prancis. Lihat fakta dan komentar di Sentinelle Nr. 145 dari 20 Apr. 2008, tersedia di: www.sfdi.org. Pada tanggal 20 April 2008, Perdana Menteri Somalia Nur Hassan Hussein mengumumkan kepada media internasional, 'Pasukan Prancis menangkap enam perompak Somalia dan membawa mereka ke Prancis untuk menghadapi keadilan. Kami mendorong langkah-langkah tersebut oleh orang Prancis. Pemerintah Somalia meminta masyarakat internasional untuk melakukan tindakan melawan pembajakan' (ibid.). Ketidakpastian tentang makna sebenarnya dan ruang lingkup deklarasi tersebut membuat Prancis mengajukan rancangan dari apa yang menjadi SC Res. 1851.

untuk tujuan menekan tindakan pembajakan dan *Armed Robbery* di laut'.¹⁸ Ungkapan 'di Somalia', meski tidak dijelaskan dalam paragraf pembukaan, jelas menyinggung tindakan yang dilakukan di daratan.¹⁹

4. Kewenangan Angkatan Laut Gabungan Negara Negara untuk Memberantas Pembajakan di Perairan Somalia Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 2383 .

Merebut sebuah kapal bajak laut di bawah kekuasaan yang diberikan kepada semua negara oleh UNCLOS menyiratkan kemungkinan penggunaan kekerasan. Ini lebih jelas lagi di bawah resolusi Dewan Keamanan yang menyebutkan penggunaan 'semua sarana yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan dan *Armed Robbery*'. Sudah diketahui bahwa dalam bahasa Dewan Keamanan 'semua sarana yang diperlukan' berarti 'penggunaan kekuatan'. Aksi Bersama Dewan Uni Eropa yang dikutip di atas membuat secara eksplisit dalam menentukan mandat 'Operasi Atalanta' ketika dikatakan bahwa Atalanta harus mengambil 'semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan kekerasan'.²⁰

Ini bukan menggunakan kekuatan melawan musuh sesuai hukum konflik bersenjata, karena tidak ada konflik bersenjata, internasional atau internal. Pembajak tidak berperang dengan negara-negara yang

¹⁸ Resolusi dewan keamanan 1851, para 6 (penekanan ditambahkan)

¹⁹ Lihat intervensi oleh Menteri Luar Negeri Inggris dan oleh Sekretaris Negara AS setelah persetujuan Res. 1851 di SC / 6046, pada 4 dan 9.

²⁰ Aksi Gabungan Dewan Uni Eropa 2008/851, supra note 35, Art. 2 (f).

menggunakan kapal kapal kecil untuk melindungi kapal dagang di perairan lepas pantai Somalia. Telah diperdebatkan bahwa bajak laut tidak menjadi *Combatant* tapi merupakan warga sipil yang di bawahioleh hukum humaniter internasional, mungkin tidak secara khusus ditargetkan kecuali untuk membela diri secara langsung.²¹ Apa pun pendapat seseorang tentang penerapan hukum konflik bersenjata, adalah fakta bahwa berlatih di perairan di lepas pantai Somalia tampaknya menunjukkan bahwa kapal perang yang berpatroli di perairan ini menggunakan senjata hanya untuk menanggapi penggunaan senjata terhadap mereka. Jadi dalam sebuah insiden di Teluk Aden yang dilaporkan pada 14 November 2008, sebuah kapal angkatan laut Inggris yang secara positif teridentifikasi sebuah kapal kargo Yaman yang telah berpartisipasi dalam usaha pembajakan sebuah kapal barang Denmark pada hari yang sama, mencoba menghentikannya dengan 'metode tanpa paksa'. Hanya ketika cara ini telah gagal, Angkatan Laut Kerajaan mengirimkan kapal kecil untuk mengepung kapal'. Begitu bajak laut melepaskan tembakan, 'Angkatan Laut membalas untuk membela diri'. Dalam kasus lain yang dilaporkan pada tanggal 21 November 2008, kapal Angkatan Laut India Tabar yang berpatroli di Teluk Aden 285 mil di lepas pantai Oman meminta sebuah kapal yang digambarkan sebagai kapal induk bajak laut, awak kapal tersebut terlihat 'dengan senjata modern lengkap', memerintahkan untuk berhenti. Ketika kapal bajak laut

²¹Perlu dicatat bahwa hanya di Res. 1851, memberi kewenangan atas tindakan melawan bajak laut dan perampok bersenjata di daratan Somalia, apakah Dewan Keamanan menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan secara konsisten tidak hanya dengan hak asasi manusia tetapi juga 'dengan hukum humaniter yang berlaku'.

'menanggapi dengan mengancam untuk "meledakkan kapal perang angkatan laut jika kapal itu didekatinya" dan menembaki kapal India tersebut, Tabar menanggapi dan menenggelamkan kapal tersebut.²²Dengan demikian, pertahanan diri terhadap serangan bersenjata atau ancamannya, baik dalam kerangka kerja hukum konflik bersenjata yang dipertanyakan atau dalam kerangka kerja yang dibahas untuk melawan pelaku non-negara, atau, lebih mungkin, sebagai pemaksaan sendiri aturan perjanjian atas tindakan polisi, nampaknya menjadi asas prinsip angkatan laut Negara yang terlibat dalam memerangi bajak laut di lepas pantai Somalia dan negara-negara tetangga.

Namun pertanyaannya harus diajukan adalah apakah kekuatan dapat digunakan dalam tindakan melawan pembajakan dan *Armed Robbery* yang terlepas dari pembelaan diri, dan apakah, jika jawaban afirmatif diberikan, hukum internasional menetapkan batasan untuk penggunaan tersebut. Tindakan melawan Pembajakan dan *Armed Robbery* mungkin, menurut saya, diasimilasi dengan pelaksanaan kekuasaan untuk melakukan tindakan pengamanan di laut lepas terhadap kapal asing yang diizinkan ke negara lain dengan pengecualian terhadap peraturan yang mengesahkan yurisdiksi eksklusif negara bendera. Izin semacam itu jarang dan enggan diberikan oleh negara-negara bendera kecuali jika diminta berdasarkan kasus per kasus. Masih ada contoh izin yang diberikan secara umum dalam beberapa perjanjian tentang perdagangan narkoba dan pencurian ikan. Di antaranya, Perjanjian *fish stocks* PBB

²²kasus ini dilaporkan dalam buletin Kantor Intelijen Angkatan Laut (AS), Departemen Analisis Maritim Sipil, ancaman di seluruh dunia untuk pengiriman, informasi peringatan Mariner, tersedia di: www.icc-ccs.org/.

1995 adalah instrumen multilateral utama.²³Perjanjian ini mengizinkan beberapa negara non-bendera untuk mengirim dan memeriksa kapal penangkap ikan di laut lepas. Pada prinsipnya tindakan semacam itu seharusnya tidak melibatkan penggunaan kekuatan, karena negara bendera tersebut, antara lain, terikat untuk 'menerima dan memfasilitasi asrama yang cepat dan aman oleh inspektur dan memberi sanksi kepada tuannya jika dia menolak untuk setuju untuk diangkat.²⁴Kemungkinan penggunaan kekuatan setelah asrama tetap dipertimbangkan dalam Pasal 22 (1) (f), yang menyatakan bahwa negara yang memeriksa harus 'menghindari penggunaan kekuatan kecuali jika dan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin keamanan para pemeriksa dan dimana inspektur terhalang dalam pelaksanaan tugasnya '.Hukum internasional umum, dalam kewenangan pemberhentian dan pengangkatan untuk tujuan menjalankan hak kunjungan berdasarkan Pasal 110 UNCLOS atau perebutan kapal bajak laut berdasarkan Pasal 105, mengandaikan bahwa kekuatan dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.Mengingat fakta bahwa mereka telah menerima instrumen yang relevan dan terikat oleh peraturan adat yang relevan dan oleh resolusi yang relevan yang diambil oleh Dewan Keamanan di bawah Bab VII, negara dapat dianggap menyetujui atau berkewajiban untuk menerima, penggunaan kekuatan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan kepolisian ini.

²³Persetujuan Implementasi Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 10 Desember 1982 Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan yang Berkepung dan Stok Ikan yang Bermigrasi, dibuka untuk ditandatangani di New York pada tanggal 4 Desember 1995, 34 ILM (1995) 1547.

²⁴UN Fish Stocks Agreement 1995, Art. 22 (3) and (4).

Dewan Keamanan hari ini memperbarui satu tahun lagi otorisasi untuk angkatan laut internasional untuk bergabung dalam memerangi pembajakan di lepas pantai Somalia, menggarisbawahi bahwa kejahatan tersebut memperburuk ketidakstabilan di negara tersebut dan memicu korupsi dan terorisme.

Dengan suara bulat mengadopsi resolusi 2383 (2017) di bawah Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan tersebut kembali menegaskan tanggung jawab utama pihak berwenang Somalia dalam upaya memerangi pembajakan. Ini juga memperbarui seruan kepada Serikat dan organisasi regional yang dapat melakukannya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang tersebut dan satu sama lain melalui penggelaran kapal angkatan laut dan pesawat militer, memberikan dukungan logistik, dan menyita dan membuang kapal, senjata dan peralatan terkait yang diduga secara wajar digunakan dalam pembajakan dan perampokan bersenjata di daerah tersebut.

Dewan tersebut memuji kontribusi dari Operasi Angkatan Laut Uni Eropa (ATUN) ATALANTA, Operasi Pelaut Samudera Atlantik Utara (NATO), Gabungan Pasukan Gabungan Angkatan Bersenjata Gabungan 151, Uni Afrika dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, sebagai juga sebagai negara individu untuk misi pembajakan kontra angkatan laut dan melindungi kapal yang transit melalui wilayah tersebut.

Dewan mengakui kebutuhan untuk terus menyelidiki dan mengadili mereka yang merencanakan, mengatur, atau membiayai atau keuntungan secara ilegal dari serangan bajak laut di lepas pantai Somalia, termasuk

tokoh kunci jaringan kejahatan yang terlibat dalam pembajakan. Ini juga mendesak negara-negara, bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan, untuk mengadopsi undang-undang untuk memfasilitasi penuntutan terhadap bajak laut yang dicurigai di lepas pantai Somalia.

Dewan juga menegaskan kembali bahwa otorisasi yang diperbaharui dalam resolusi hanya diterapkan sehubungan dengan situasi di Somalia dan tidak mempengaruhi hak, kewajiban dan tanggung jawab Negara-negara Anggota berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi tentang Hukum Laut.

Setelah diadopsi, Evgeny T. Zagaynov (Federasi Rusia) mengatakan bahwa dia telah mendukung resolusi tersebut namun mencatatnya memiliki fokus regional. Pertarungan melawan pembajakan membutuhkan format yang lebih global, dengan pendekatan yang lebih umum untuk memerangi pembajakan, termasuk penuntutan terhadap bajak laut. Platform yang paling sukses untuk itu adalah Contact Group to Fight Pembajakan di lepas pantai Somalia. Pembajakan adalah mesin untuk terorisme dan perdagangan senjata ilegal, katanya, dan bajak laut sering dikenai hukuman karena kejahatan lainnya. Adalah bijaksana untuk mempertimbangkan cara optimal untuk melawan ancaman tersebut. Dewan harus terus memainkan peran politik dalam pertarungan.

Abukar Dahir Osman (Somalia) mengatakan bahwa pemerintahnya bekerja keras untuk mengatasi pembajakan dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur di Zona Ekonomi Eksklusif negara tersebut. Masalah itu berdampak buruk pada Somalia dan menghabiskan

sumber daya makanan laut melalui penangkapan ikan ilegal oleh perusahaan asing. Akar penyebab pembajakan dan penangkapan ikan semacam itu adalah kontrol negara yang buruk, kurangnya peluang ekonomi legal dan tidak adanya peraturan hukum. Meski pembajakan telah menurun, namun bisa dengan mudah meningkat lagi. Perpanjangan mandat saat ini untuk memerangi pembajakan hanya bisa efektif jika ditangani dengan sangat efektif dari penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Dia mendorong lebih banyak penelitian mengenai hubungan kompleks antara pembajakan dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur.²⁵

Hal yang telah dijelaskan dalam pasal 58 (3) hukum laut mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Prinsip umum yaitu kapal yang berlayar di wilayah ZEE adalah kapal resmi dari negara tersebut dan mengibarkan nama asal negara dalam pelayaran mereka. Kapal asing yang berlayar di wilayah ZEE memiliki ijin dari negara pemilik wilayah. Bila kapal laut tanpa ijin masuk wilayah tersebut dapat diakses sebagai kapal hukum dan dapat kapal selaras dengan perompak. Penjagaan kedaulatan teritorial suatu negara menjadi pertimbangan dalam pelayaran kapal - kapal asing. Kasus yang terjadi di Somalia adalah kapal perompak banyak berlayar di wilayah teritorial ZEE negara somalia. Yang penindakan yang dilakukan kapal asing terhadap kapal perompak menjadi sangat sulit. Kapal asing tidak dapat mengajukan banyak karena batas negara mereka terhadap

²⁵ <https://www.un.org/press/en/2017/sc13058.doc.htm> terakhir diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

batas wilayah laut mereka. Kapal asing juga dibatasi oleh peraturan yang tunduk hak untuk kapal perompak.

Hak untuk mendatangi perompak diatur dalam pasal 110 yang berisi kapal perang tidak diijinkan mendatangi dan menindak kapal asing kecuali kapal selaras dengan perompak dan kapal tidak membawa identitas kebangsaan.²⁶ Dalam kasus di ayat (1), kapal asing harus benar - benar asli kebangsaan tidak hanya melalui pengibaran. Kapal perompak. Kapal asing untuk tindakan hukum yang menjaga kedaulatan wilayah negara. Identitas kebangsaan menjadi penting untuk datang kapal untuk menentukan kapal tersebut adalah kapal perompak or kapal komersial resmi negara.²⁷ Hukum yang dipersenjamin yang harus dilalui sebelum pelayaran kapal. Pemeriksaan dokumen harus terlebih dahulu sebelum peluncuran kapal perompak. Langkah itu tentunya. Penindakan oleh kapal asing yang ditawan oleh perompak. Ketetapan hukum juga tidak efektif dalam mendukung penangkapan dan penindakan terhadap perompak.

Ketetapan hukum dalam artikel 105 memuat syarat-syarat pengadilan terhadap kasus perompakan dalam berada di dalam negeri negara perompak. Hukuman terhadap penjarahan harta, penyerangan terhadap korban hanya bisa dijatuhkan oleh negara yah. Ketetapan

²⁶Robert Beckman. 2009. 'Somali Pembajakan- Is International Law Part of The Problem or Part of The Solution'. RSIS. h.20

²⁷*ibid.* h. 21

hukum untuk penangkapan perompak termuat dalam artikel 107 dimana kapal kapal perompak hanya bisa dilakukan oleh kapal perang dan pesawat militer yang penting dan pelayanan pemerintah.²⁸ Dalam hal melakukan upaya pemberantasan perompak tidak dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa tindakan ilegal perompakan terjadi di dalam wilayah teritorial negara Somalia. Maka dalam melakukan pengejaran serta penangkapan perompak, negara yang berhubungan harus tetap hukum yang ada di Somalia, jadi negara yang akan melakukan pengejaran dan penangkapan tidak bisa secara bebas untuk memberantas perompak karena dibatasi oleh hukum yang berlaku di Somalia. ZEE tergolong sebagai 'perampokan bersenjata melawan kapal' atau penyerangan senjata melawan kapal.²⁹ Tentunya identitas ini menjadi sulit bagi kapal asing untuk melakukan penyerangan melawan perompak Somalia. Berdasarkan artikel 107 maka negara yang dapat melakukan penangkapan dan penyerangan harus memiliki otoritas yang diberikan oleh negara. Kapal perang yang diijinkan untuk melakukan serangan harus memiliki yuridiksi eksklusif dari negara kapal perompak.³⁰ Dengan ketetapan ini dapat dianalisis terhadap kapal perompak tidak bisa terjadi di wilayah kedaulatan negara. Kapal asing tidak memiliki hak untuk masuk wilayah kedaulatan itu pun melakukan penyerangan. Penyerangan tidak bisa terjadi sehingga penangkapan pun menjadi tindakan yang tidak mungkin terjadi pula.

²⁸*Ibid.* h. 22

²⁹*Ibid.* h. 25

³⁰*Ibid.* h. 23

Sedangkan menurut artikel 105 hanya bisa dijatuhkan melalui pengadilan domestik negara asal perompak. Kasus yang terjadi di Somalia adalah kapal asing yang dibajak oleh kapal perompak sebagian besar terjadi di balik ZEE negara somalia sendiri. Kasus ini menjadi unik karena tidak ada negara yang bisa menindak penyerangan itu saat ini oleh yuridiksi kedaulatan negara adalah Somalia. Negara yang tergolong gagal negara atau negara gagal dalam mengatasi masalah yang sedang terjerumus dalam hal ini untuk menindak aktor-aktor perompakan di ingatnya. Perompakan sudah menjadi aktivitas yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Alasan kesejahteraan itu menjadi alasan yang kuat bagi setiap individu untuk menghalalkan tindakan perompakan. Masyarakat menjadikan tindakan tersebut sebagai profesi yang. Disamping itu, sebagai negara yang gagal dalam perpolitikan karena konflik persaudaraan yang terus menerus terjadi begadang lemahnya pemberlakuan hukum domestik. Hukum internasional seperti ketetapan-ketetapan di atas telah diratifikasi oleh negara Somalia. Belum ratifikasi terhadap hukum yang tidak sesuai dengan pembuatan ketetapan hukum domestik. Sehingga penindakan terhadap perompak menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Dibawah hukum konvensi laut, definisi perompakan secara sederhana diartikan sebagai 'perampokan laut' yang diatur secara penuh oleh hukum domestik masing-masing negara. Hukum domestik jarang mengizinkan perahu atau pesawat perang dari negara lain untuk melakukan intervensi. Tindakan melawan terhadap perompakan atas

politis dan tidak dimuat dalam hukum internasional. Saat perompakan terjadi di dalam hal ini maka perompak merupakan subyek dari yuridiksi negara tersebut. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menghukum tindakan kriminal tersebut. Konvensi hukum laut memahami perompakan dalam ruang yang sempit sehingga memenuhi penggunaan hukum tersebut untuk mengatasi dan menghukum perompakan seperti di Somalia.³¹ Bahkan, konvensi PBB tentang Hukum Laut telah diratifikasi oleh hampir setiap negara di dunia (kecuali Amerika Serikat).³²

Kendala yang dialami dalam pengadilan kasus perompakan terjadi seperti berdasarkan pengalaman masa lalu, perompak Somalia yang ditangkap cenderung bersikeras dalam pengadilan bahwa mereka bukan perompak, melainkan nelayan. Pernyataan tersebut sangat menghambat penuntutan dan penahanan. Mengingat penyediaan layanan nasihat dan terjemahan ke dalam bahasa asli terdakwa akan sangat sulit, bahkan di negara tetangga yaitu Kenya.³³

Kendala lainnya di dalam praktik hukum adalah bagi bangsa yang akan mengambil tindakan pemberantasan bajak laut haruslah menggunakan biaya dari negara yang akan memberantas bajak laut, begitu juga dengan kepolisian yang mengatasi soal pembajakan. Dalam praktiknya, Negara mau menanggung sendiri biaya atas pemberantasan bajak laut apabila hal tersebut menyangkut kepentingan Negara yang

³¹*Op Cit.* h. 569-570

³²Eugene Kontorovich. Pembajakan and International Law. <http://www.globallawforum.org/ViewPublication.aspx?ArticleId=96> [3 februari 2018]

³³*Ibid.*

bersangkutan. Contoh kasus perompak yang menangkap kapal pesiar milik Prancis. Prancis menanggapi dengan semangat yang luar biasa, mengirim pasukan ke daratan Somalia untuk membebaskan para penumpang dan awak, yang ditahan Prancis mengidentifikasi perompak, dan membawa mereka kembali ke Paris. Jadi, sementara perompak secara legal disebut musuh seluruh umat manusia, dalam praktik negara bertindak seolah-olah mereka adalah musuh dari negara-negara mereka menyerang.³⁴

Selain dari persoalan biaya, juga yang menjadi masalah ialah tidak banyak negara bersedia menanggung resiko dalam hal pengejaran terhadap perompak sampai ke wilayah daratan Somalia dikarenakan pertama, Somalia telah dilanda kekerasan bersenjata sejak penggulingan diktator Mohamed Siad Barre pada tahun 1991. Setidaknya perompak bersenjata ini telah memiliki pengalaman perang selama lebih dari 15 tahun dan memiliki persenjataan yang lengkap. Patroli oleh kapal perang dan pengejaran di darat tidak akan membuat mereka ketakutan. Kedua, akibat konflik bersenjata berkepanjangan, Somalia telah menjadi salah satu negara termiskin di Afrika. Aksi perompakan terbukti dapat menghasilkan banyak uang dari tebusan yang dibayarkan. Dalam keadaan negara yang kacau dimana nyawa bisa melayang sewaktu-waktu

³⁴ *Ibid.*

maka resiko tertangkap dan diadili atas perompakan masih lebih kecil bila dibandingkan hasil dari perompakan itu sendiri.³⁵

Memaksa pihak berwenang Negara Somalia untuk menyelesaikan masalah pembajakan dan *Armed Robbery* ini dengan bantuan angkatan laut gabungan sesuai dengan isi dari resolusi dewan keamanan PBB nomor 2383 yaitu :

‘Underlines the primary responsibility of the Somali authorities in the fight against pembajakan and armed robbery at sea off the coast of Somalia, welcomes the draft coast guard law which the Somali authorities, with the support of the European Union Naval Force (EUNAVFOR) Operation ATALANTA and EUCAP Somalia have submitted to the Council of Ministers for approval by Parliament and urges the Somali authorities, to continue their work to pass a comprehensive set of anti-piracy and maritime laws without further delay and establish security forces with clear roles and jurisdictions to enforce these laws and to continue to develop, with international support as appropriate, the capacity of Somali courts to investigate and prosecute persons responsible for acts of pembajakan and armed robbery, including key figures of criminal networks involved

³⁵Judarwanto. Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia.
<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/> diakses pada 28 febuari 2018.

*in pembajakan who plan, organize, facilitate, or illicitly finance or profit from such attacks;*³⁶

Dan juga menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum internasional dan juga secara hukum hak asasi manusia yang tertulis pada point 7 resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2383 bukan hanya tertuju pada Negara Somalia tetapi juga Negara Negara tetangga yang juga memiliki kewajiban berdasarkan pada poin ke 7 tersebut yang berbunyi :

*'Calls upon the Somali authorities to make all efforts to bring to justice those who are using Somali territory to plan, facilitate, or undertake criminal acts of pembajakan and armed robbery at sea, and calls upon Member States to assist Somalia, at the request of Somali authorities and with notification to the Secretary-General, to strengthen maritime capacity in Somalia, including regional authorities and, stresses that any measures undertaken pursuant to this paragraph shall be consistent with applicable international law, in particular international human rights law;*³⁷

Berdasarkan isi dari resolusi dewan keamanan nomor 2383 kewajiban untuk menekan perkembangan pembajakan dan *Armed*

³⁶ Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2383 angka 6.

³⁷ Resolusi dewan keamanan PBB nomor 2383 angka 7

Robbery merupakan kewajiban semua Negara anggota , organisasi internasional dan juga terkhusus kepada Negara Somalia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

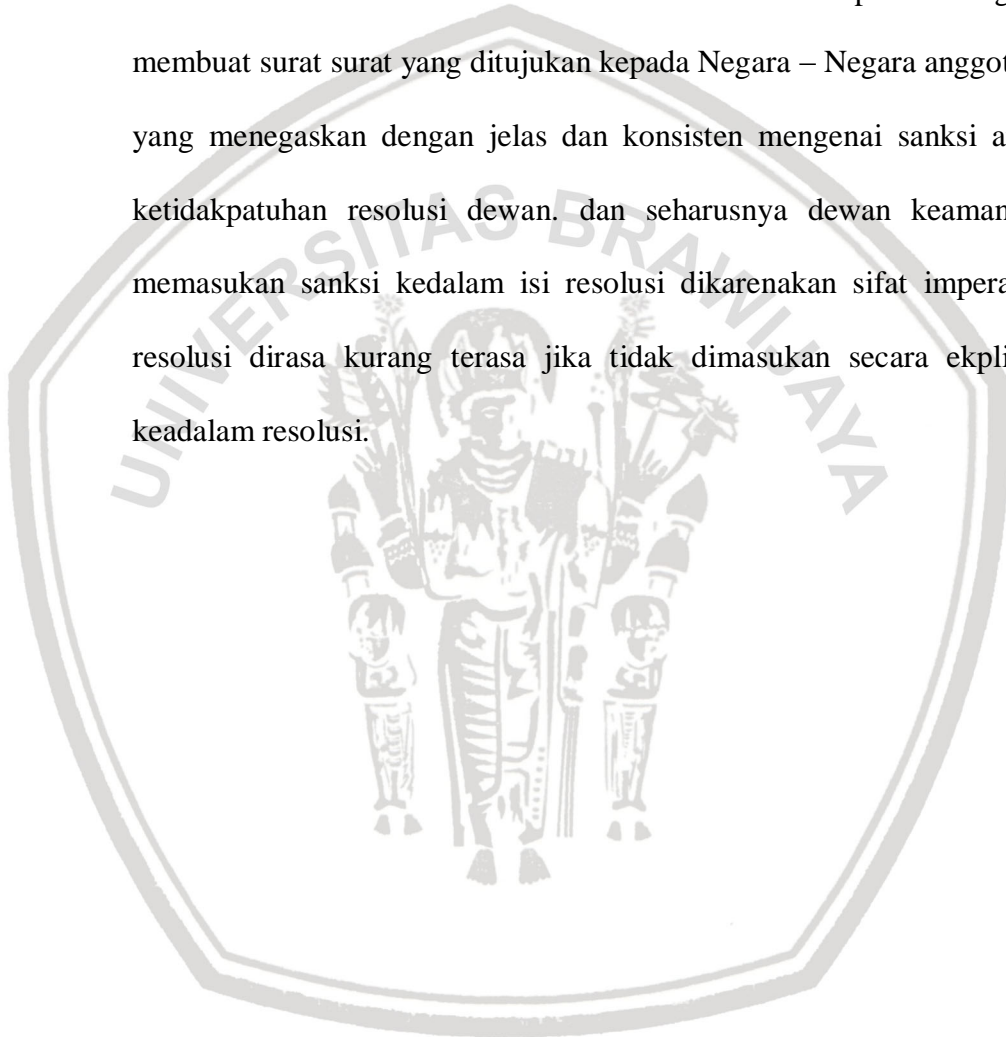
A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan hukum internasional, maksud dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2383 pada 07 November 2017 memiliki kekuatan secara hukum bahwa sifat dari resolusi tersebut adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Legal Binding Force*) dan imperatif/memaksa seperti yang tercantum di dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 2 ayat (6), dan Pasal 49 Piagam PBB. Kekuatan mengikat secara hukum diatur juga didalam Pasal 27 Piagam PBB dan dikaitkan dengan Pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan bahwa bukan saja somalia tetapi semua pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan – keputusan Dewan Keamanan PBB untuk aktif dalam masalah pemberantasan pembajakan dan Armed robbery di somalia.
2. Sanksi yang terdapat dalam Resolusi Nomor 2383 tidak dituliskan secara implisit maupun eksplisit namun jika terjadi pelanggaran dapat dikenakan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam PBB. Sanksi yang dapat diterapkan dapat berupa militer maupun non militer, seperti embargo dikeluarkan dari anggota PBB, blockade secara damai, secara ekonomi. Akan tetapi penentangan terhadap resolusi juga dapat menjadi pendorong bagi kemajuan hukum internasional ditinjau dari

permasalahan permasalahan Ketidakpatuhan terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan keamanan baik oleh , Negara , Pemerintahan maupun dari individu.

B. Saran

Dewan Keamanan harus memanfaatkan kesempatan dengan membuat surat surat yang ditujukan kepada Negara – Negara anggota , yang menegaskan dengan jelas dan konsisten mengenai sanksi atas ketidakpatuhan resolusi dewan. dan seharusnya dewan keamanan memasukan sanksi kedalam isi resolusi dikarenakan sifat imperatif resolusi dirasa kurang terasa jika tidak dimasukan secara eksplisit kedalam resolusi.



Daftar Pustaka

Buku

A.D McNair, *The Law of Treaties*. Oxford, Claredon press, 1961.

Antonios Tzanakopoulos, *Disobeying the Security Council: Countermeasures Against Wrongful Sanctions, 1st ed., Oxford Monographs in International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011

Apriadi Tamburaka. 2011. **'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV.Sinar Kudus'**. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group).

B. Simma and P. Alston, *'The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles'* Australian Yearbook of International Law', 1992.

Benedetto Conforti. 2005. *The Law and Practice of the United Nations*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher

Chatterjee, *Encyclopedia of Global Justice*,

D.W. Bowett. Q.C., LL.D. 1992. **Hukum Organisasi Internasional**. Alih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Penerbit Sinar Grafika.

Deen K. Chatterjee, 2011, *Encyclopedia of Global Justice: A – I*, Rotterdam, Springer.

Gene Sharp, 2012, *From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation*, London, Serpent's Tail.

Goodin, *'Toward an International Rule of Law'*.

Henry G. Schemers and Niels M.Blokker. 2003. *International Institutional Law Unity Within Diversity*. Boston : Martinus Nijhoff Publisher

Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

J.G.Starke, *Pengantar Hukum internasional 1*, terjemahan bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta : Sinar Grafika 2008)

Jacques Fomerand. 2009. *The A to Z of the United Nations*. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc.

Jeremy Matam Farral. 2007. *United Nations Sanction and the Rule of Law. Cambridge Studies in International and Comparative Law*: Cambridge University Press

Lung-Chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented*

Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung : Nusamedia

Philippe Sands dan Pierre Klein. 2001. *Bowett's Law of international institutions*. London: Sweet and Maxwell.

Robert Beckman. 2009. 'Somali Pembajakan- Is International Law Part of The Problem or Part of The Solution'. RSIS.

Tammes, *Decisions of international organs as a source of international law*.

Journal

A. Anindityo Adi Primasto dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. **Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB**. Jakarta: Universitas Indonesia.

Anonim. **Tinjauan Umum Tentang Resolusi PBB** dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35625/3/Chapter%20II.pdf>

Elias Davidsson. 2002. *Legal Boundaries to UN Sanction*. Published in the **International Journal of Human Rights**. Vol. 7. No. 4

F. Ibanez. *Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian Ocean(2005-2011) Evolution and Modus Operandi*. Vol 1, Journal, 2013.

Martti Koskenniemi , International Law Commission, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission, Finalized*, New York, United Nations, 13 April 2006,

Matt Rosenberg. *United Nations Security Council : The Security Council is the Most Powerful body in the United Nations* dalam <http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/securitycouncil.htm>

Nugroho Wisnumurti dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. **Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB**. Jakarta: Universitas Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan 1306

Resolusi Dewan Keamanan 1851

Resolusi Dewan Keamanan 2383

Robert E. Goodin, 'Toward an International Rule of Law: Distinguishing International Law-Breakers from Would-Be Law-Makers., Journal of Ethics

UN Fish Stocks Agreement 1995,

Internet

Sejarah Negara Somalia. <http://www.bimbie.com/sejarah-negara-somalia.htm>.

Anonim. UN at a Glance dalam <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> diakses tanggal 1 Oktober 2017.

Anonim. Main Bodies dalam <http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml> diakses tanggal 1 Oktober 2017

Anonim. What is the Security Council ? dalam <http://www.un.org/sc/about/shmtl> diakses tanggal 2 oktober 2017

Anomin . 28 Mei 2013. *United Nations Security Council* dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532070/United-Nations-Security-Council> diakses tanggal 2 Oktober 2017

